



# PEMERINTAH KOTA BANDUNG

## SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

### SALINAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 640/Kep.210-Bag.ORPAD/2015**

**TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA**

**UTAMA (IKU)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA BANDUNG TAHUN 2013 - 2018**

**WALIKOTA BANDUNG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
  - b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Bandung Kota Bandung;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  - 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  - 6. Peraturan Menteri ...

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013 -2018.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Keputusan Walikota Bandung Kota Bandung tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kota Bandung Kota Bandung.
- KEDUA :** Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Kota Bandung Kota Bandung, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kota Bandung Kota Bandung.
- KETIGA :** Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kota Bandung.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bandung  
Pada Tanggal : 3 Maret 2015

**WALIKOTA BANDUNG**

**TTD.**

**MOCHAMAD RIDWAN**



Untuk Salinan Resmi

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,**

**Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si**

**Pembina Utama Madya**

**NIP. 19620429 198509 1 001**

LampiranI : Surat Keputusan Walikota Bandung  
 Nomor : 640/Kep.210 - Bag. ORPAD/2015  
 Tanggal : 03Maret 2015

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KOTA BANDUNG  
 TAHUN 2013-2018 HASIL REVIU**

**Misi 1: Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tataruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan**

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA	KETERANGAN / KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Kota	Rasio minimal Ruas Jalan dalam Kondisi Baik	Persentase	SPM	$\frac{\text{Panjang jalan dalam kondisi baik}}{\text{Pa} \times \text{L} \times \text{K} \times \text{A} \times \text{B} \times \text{D}} \times 100\%$	DBMP	kriteria kondisi jalan adalah bahwa setiap ruas jalan jalan harus memiliki kerataan permukaan jalan yang memadai bagi kendaraan untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman, dan nyaman (PERMEN PU NO. 14/PRT/M/2010 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)
		Persentase minimal jumlah PJU terbangun yang berfungsi baik	Persentase	SPP	$\frac{\text{Jumlah PJU yang ada}}{\text{Jumlah Standar Kebutuhan Ketersediaan PJU}} \times 100\%$	DBMP	Memenuhi target SPP & SPM
		Presentase minimal banjir terselesaikan	Persentase	Memenuhi target RPJMD	$\frac{\text{Jumlah lokasi banjir terselesaikan} (//)}{\text{Jumlah lokasi banjir} (x)} \times 100$	DBMP	Penanganan banjir sampaituntas sehingga jumlah titik banjir di Kota Bandung akan berkurang
		Persentase aspek penyebab kemacetan yang teratasi	Persentase	Banyaknya aspek penyebab kemacetan yang belum tuntas tertangani	Jumlah aspek yang tertangani dibagi jumlah aspek yang harus ditangani kali 100	DISHUB	Semakin banyak aspek penyebab kemacetan yang teratasi maka kondisi lalu lintas semakin lancar

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA	KETERANGAN / KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Persentase Taman/Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota dengan Kriteria baik	Persentase	Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan	$\frac{\text{Luas RTH}}{\text{Luas Wilayah Kota Bandung}} \times 100\%$	Diskamtam dan BPLH	RTH yang berkualitas adalah RTH yang memiliki fungsi ekologi, sosial dan estetika.
		Persentase pelayanan sampah perkotaan	%	Termasuk ke dalam target RPJPD Kota Bandung Tahap III 2014	$\frac{\text{Tingkat pengelolaan sampah kota}}{\text{jumlah timbulan sampah kota}} \times 100\%$	BPLH dan PD Kebersihan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencatatan operasional PD. Kebersihan</li> <li>2. Rekapitulasi data dari masing-masing kecamatan dan pencatatan BPLH serta operasional PD. Kebersihan</li> <li>3. Pendataan di masing-masing operasional WTE oleh BPLH Kota Bandung</li> </ol>

**Misi 2: Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani**

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA	KETERANGAN / KRITERIA													
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN															
1	2	3	4	5	6	7	8													
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	Nilai Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	Kategori/ Nilai	Sesuai dengan agenda Walikota Bandung road to WTP 2015	Hasil Evaluasi / Opini BPK RI	DPKAD	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK													
		Persentase SKPD dengan IKM " Baik "	Kategori	Sesuai Amanat UU No.25/2009 ttg Pelayanan publik	Jumlah SKPD dengan IKM 75 atau lebih dibanding keseluruhan SKPD	SKPD pelayanan publik	Kualitas pelayanan publik yang prima													
4.	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja birokrasi	Hasil Evaluasi AKIP Kota	Kategori	Sesuai Amanat Perpres No 29 Tahun 2014 ttg Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Kota Bandung	Semua SKPD	Nilai Evaluasi AKIP Kota Bandung diukur sesuai dengan Permenpan No. 25/2012 tentang Juklak Evaluasi AKIP serta perubahannya dan Perwal Kota Bandung ttg Juklak Evaluasi AKIP SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung													
		Nilai LPPD	Nilai	Berdasarkan PP 3 Tahun 2007 Pemerintah Kota Bandung berkewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Skor evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua SKPD	Nilai LPPD berdasarkan Indeks EKPPD: <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>Indeks EKPPD</th> <th>Prestasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>3,00 &lt; ..... ≤ 4,00</td> <td>Sangat Tinggi</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2,00 &lt; ..... ≤ 3,00</td> <td>Tinggi</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1,00 &lt; ..... ≤ 2,00</td> <td>Sedang</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>0,00 &lt; ..... ≤ 1,00</td> <td>Rendah</td> </tr> </tbody> </table>	NO	Indeks EKPPD	Prestasi	1	3,00 < ..... ≤ 4,00	Sangat Tinggi	2	2,00 < ..... ≤ 3,00	Tinggi	3	1,00 < ..... ≤ 2,00	Sedang	4
NO	Indeks EKPPD	Prestasi																		
1	3,00 < ..... ≤ 4,00	Sangat Tinggi																		
2	2,00 < ..... ≤ 3,00	Tinggi																		
3	1,00 < ..... ≤ 2,00	Sedang																		
4	0,00 < ..... ≤ 1,00	Rendah																		

**Misi 3: Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas, dan berdaya saing**

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA	KETERANGAN / KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN		
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS)	Tahun	Indikator Makro	Jumlah tahun bersekolah individu di atas 15 tahun dibagi Jumlah penduduk di atas 15 tahun	BPS, DISDIK dan SUSENAS	
		Presentase Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Persentase	Indikator Makro	Jumlah penduduk usia di atas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis dibagi jumlah penduduk usia di atas 15 tahun dikali 100	BPS, DISDIK dan SUSENAS	
6.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Persentase Balita bergizi buruk	Persentase	Permenkes No. 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan GIZI	Jumlah Balita giziburuk dibagi dengan jumlah balitas eluruhnya	Dinkes (Bidang YANKES)	Hasil penghitungan menggunakan kriteria pengukuran status gizi balita
		Angka Kematian Ibu	Per 100.000 kelahiran hidup	UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	Jumlah kematian Ibu karena kehamilan, persalinan, masa nifas dalam suatu wilayah dan periode tertentu dibandingkan dengan jumlah lahir hidup dalam waktudan periode yang sama	Dinkes (Bidang YANKES)	Cakupan penurunan jumlah kematian ibu karena kehamilan
		Angka Kematian Bayi	Per 100.000 kelahiran hidup	UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	Jumlah kematian bayi dibawah usia 1 Tahun dalam suatu wilayah dan periode tertentu dibandingkan dengan jumlah lahir hidup dalam waktu dan periode yang sama	Dinkes (Bidang YANKES)	Cakupan penurunan jumlah kematian bayi
7.	Meningkatnyapem berdayaanperemp uandanperlindung anak	Persentase Kelurahan Layak Anak	Persentase	Amanah Undang-Undang Permenneg PP PA NO. 11 ttg Kebijakan Pengembangan Kab/Kota Layak Anak Kebijakan Strategis Daerah Amanah RPJMD	Jumlah Kelurahan layak anak dibandingkan dengan jumlah target kelurahan layakanak se-kota Bandung	BPPKB	

**Misi 4: Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan**

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA	KETERANGAN / KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN		
1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Berkembangnya Kota Bandung sebagai Kota Tujuan Wisata	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	Sebagai bahan data evaluasi keberhasilan pariwisata Kota Bandung	Cukup Jelas	DISBUDPAR	Kunjungan Wisatawan terdiri dari Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara
9.	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Jumlah Lowongan pekerjaan baru	Lowongan Kerja	Program prioritas Walikota Bandung (Bandung Sejahtera)	Jumlah Informasi Lowongan Kerja	DISNAKER	
		Jumlah Wirausaha baru	Orang	Program prioritas Walikota Bandung (Bandung Sejahtera)	Jumlah wirausaha baru	Dinas KUKM perindag	

Untuk Salinan Resmi

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



**Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19620429 198509 1 001**

**WALIKOTA BANDUNG**

**TTD.**

**MOCHAMAD RIDWAN**

Lampiran II : Keputusan Walikota Bandung

Nomor : 640/Kep.210-Bag.ORPAD/2015

Tanggal : 3 Maret 2015

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

1. SEKRETARIAT DAERAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN / KRITERIA																
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA																	
1.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai LPPD	Nilai	Untuk memenuhi Pasal 27 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah memiliki kewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKPj Kepala Daerah kepada DPRD dan ILPPD Kepada Masyarakat, dan ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD).	Nilai LPPD merupakan Indeks Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (EKPPD) Tim Nasional atas LPPD tahun sebelumnya, yang dinilai berdasarkan Indeks Komposit dari dua variabel utama, yakni Indeks Capaian Kinerja (ICK) sesuai Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman EKPPD dan Indeks Kesesuaian Materi (IKM) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKPj Kepala Daerah kepada DPRD dan ILPPD Kepada Masyarakat.	Sekretariat Daerah	Nilai LPPD berdasarkan Indeks EKPPD: <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>Indeks EKPPD</th> <th>Prestasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>3,00&lt;.....≤4,00</td> <td>Sangat Tinggi</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2,00&lt;.....≤3,00</td> <td>Tinggi</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1,00&lt;.....≤2,00</td> <td>Sedang</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>0,00&lt;.....≤1,00</td> <td>Rendah</td> </tr> </tbody> </table>	NO	Indeks EKPPD	Prestasi	1	3,00<.....≤4,00	Sangat Tinggi	2	2,00<.....≤3,00	Tinggi	3	1,00<.....≤2,00	Sedang	4	0,00<.....≤1,00	Rendah	
NO	Indeks EKPPD	Prestasi																					
1	3,00<.....≤4,00	Sangat Tinggi																					
2	2,00<.....≤3,00	Tinggi																					
3	1,00<.....≤2,00	Sedang																					
4	0,00<.....≤1,00	Rendah																					
.	Persentase Kecamatan Berkinerja Baik		%	Dalam rangka mendorong peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan khususnya pada level Pemerintah tingkat Kecamatan sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan memaksimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Camat yang ditegaskan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 250 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan	Pengukuran Kecamatan Berkinerja Baik dilaksanakan melalui Evaluasi Kinerja (Evkin) Camat berdasarkan penilaian pada 5 (lima) bidang, yakni Bidang Pelayanan Publik, Bidang Kebersihan, Bidang Ketertiban, Bidang Keindahan, dan Bidang Inovasi dan Kreativitas. Kecamatan yang berdasarkan evaluasi kinerja camat pada akhir tahun yang masuk Indeks Nilai kategori A dan mendapat Raport Hijau dikategorikan sebagai Kecamatan Berkinerja Baik. Persentase Kecamatan Berkinerja Baik	Sekretariat Daerah	Indeks Kategori Evaluasi Kinerja Camat Sebagai Berikut: <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>Indeks Nilai Evkin Camat</th> <th>Kategori</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>85,00&lt;.....≤100,00</td> <td>A</td> <td>Raport Hijau</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>75,00&lt;.....≤84,99</td> <td>B</td> <td>Raport Kuning</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>00,00&lt;.....≤74,99</td> <td>C</td> <td>Raport Merah</td> </tr> </tbody> </table>	NO	Indeks Nilai Evkin Camat	Kategori	Keterangan	1	85,00<.....≤100,00	A	Raport Hijau	2	75,00<.....≤84,99	B	Raport Kuning	3	00,00<.....≤74,99	C	Raport Merah
NO	Indeks Nilai Evkin Camat	Kategori	Keterangan																				
1	85,00<.....≤100,00	A	Raport Hijau																				
2	75,00<.....≤84,99	B	Raport Kuning																				
3	00,00<.....≤74,99	C	Raport Merah																				

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN / KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
				Fungsi Satuan Organisasi pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.	diukur melalui formulasi berikut: <i>Jumlah Kecamatan yang masuk Indeks Nilai Kategori A dan mendapat Raport Hijau dibandingkan Jumlah Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dikalikan 100%.</i>		
2.	Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk Hukum daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Prosentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	%	Untuk mengetahui seberapa banyak jumlah Produk Hukum Daerah yang terbit sesuai dengan mekanisme pembentukan Produk Hukum Daerah	Prosentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah, dilakukan penataan dalam penyusunan produk hukum daerah (Perda) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah	Sekretariat Daerah	<p>Kriteria mekanisme pembentukan produk hukum daerah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya tertib pembentukan peraturan perundang-undangan dengan telah dilakukan melalui mekanisme Program Legislasi Daerah, sehingga pembentukan Peraturan Daerah dapat dilaksanakan dengan terencana dan terpadu mulai dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan sampai dengan saat ini;</li> <li>2. Dalam perumusan Raperda pasca penetapan Program Legislasi Daerah ditindaklanjuti dengan Instruksi Walikota;</li> <li>3. Penyusunan dalam penetapan Program Legislasi Daerah dan Instruksi Walikota dilaksanakan setiap tahun sebelum penetapan Peraturan Daerah tentang APBD;</li> <li>4. Setiap usulan Raperda yang telah ditetapkan dalam Program Legislasi Daerah disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemrakarsa kepada Walikota sesuai dengan jadwal agenda pembahasan dalam Program Legislasi Daerah secara tepat waktu;</li> <li>5. Setiap Raperda yang diusulkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemrakarsa sebelum disampaikan Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dilakukan pembahasan terlebih dahulu oleh Tim Asistensi pembahasan rancangan Lembaran Kota dan Raperda;</li> <li>6. Setiap produk hukum daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bandung dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>7. Seluruh produk hukum daerah yang telah diterbitkan dilakukan evaluasi secara bertahap oleh Tim Evaluasi produk hukum daerah;</li> <li>8. Meningkatkan kesadaran hukum aparat dan masyarakat melalui publikasi produk hukum dan penyuluhan hukum terpadu;</li> <li>9. Seluruh produk hukum daerah yang sudah diterbitkan telah disosialisasikan dan dipublikasikan setiap tahun melalui media JDIH online, website</li> </ol>

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN / KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							<a href="http://jdihbagian.hukum.bandung.go.id">http://jdihbagian.hukum.bandung.go.id</a>
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase SKPD yang pengelolaan pelayanan publiknya baik	%	Untuk memenuhi UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Perda Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik	Jumlah SKPD yang memenuhi kriteria dibandingkan dengan jumlah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung	Sekretariat Daerah	kriteria pengukuran : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan minimal 4 dari 5 kriteria indikator penerapan Standar Pelayanan Publik</li> <li>2. melaksanakan minimal 3 dari 5 kriteria indikator budaya pelayanan prima.</li> <li>3. melaksanakan minimal 4 dari 5 kriteria indikator pengelolaan pengaduan masyarakat.</li> <li>4. telah melaksanakan survey kepuasan masyarakat minimal 2 tahun secara berkesinambungan.</li> <li>5. berada pada zona hijau standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI berdasarkan hasil self assesment dan penilaian pihak independent</li> </ol>
.		Rata-Rata IKM Kota Bandung	Angka	Untuk memenuhi UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Perda Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik	Jumlah Nilai IKM SKPD yang melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat dibagi Jumlah SKPD yang melaksanakan Survey	Sekretariat Daerah	
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai Evaluasi AKIP Kota Bandung Komponen Pelaporan Kinerja	Angka	Untuk memenuhi Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.	Nilai Evaluasi AKIP Kota diukur sesuai dengan Permenpan No. 20/2013 tentang Juklak Evaluasi AKIP.	Sekretariat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Kota Bandung diukur sesuai dengan Permenpan No. 25/2012 tentang Juklak Evaluasi AKIP serta perubahannya dan Perwal Kota Bandung ttg Juklak Evaluasi AKIP SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung
5.	Meningkatnya implementasi Kerjasama Dalam dan Luar Negeri	Persentase naskah kerjasama aktif lingkup dalam negeri	%	Kolaborasi atau kerjasama merupakan salah satu pilar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bandung. Melalui kolaborasi dengan	Persentase jumlah ruang lingkup dalam naskah kerjasama aktif lingkup dalam negeri yang ditindaklanjuti oleh SKPD dibandingkan dengan Jumlah keseluruhan ruang lingkup dari naskah	Sekretariat Daerah	Yang dimaksud naskah kerjasama aktif adalah naskah kerjasama yang jangka waktu kerjasamanya masih berlaku pada tahun anggaran berjalan atau kegiatan yang dilaksanakan atas dasar kerjasama tersebut masih efektif

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN / KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
		yang diimplementasikan		<p>berbagai pihak baik yang bersifat vertikal (dengan pemerintah pusat, Kementerian/LPKN, dan instansi pemerintahan lainnya), maupun kolaborasi horizontal (antar daerah, dan stake holder pembangunan lainnya baik sektor privat maupun masyarakat), diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan pembangunan di Kota Bandung, baik dalam pembangunan infrastruktur maupun non infrastruktur, serta mempercepat penyelenggaraan dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat kota Bandung, yang pada akhirnya dapat segera mewujudkan visi Kota Bandung yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera.</p> <p>Oleh karena itu setiap kerjasama yang telah dibuat oleh Pemerintah Kota Bandung, harus senantiasa dapat diimplementasikan oleh setiap SKPD terkait dalam tindakan nyata, dan diharapkan dapat terukur hasilnya untuk mengetahui efektivitas dari kerjasama yang telah dibuat tersebut.</p> <p>Meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 8 PP No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah disebutkan bahwa pelaksanaan perjanjian kerjasama dapat dilakukan oleh SKPD, namun demikian, sesuai dengan Perwal No. 298 Tahun 2013 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Satuan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung, disebutkan bahwa salah satu tugas pokok bagian kerjasama adalah melaksanakan</p>	kerjasama aktif lingkup dalam negeri		<p>berjalan.</p> <p>Batasan naskah kerjasama yang dijadikan objek pengukuran untuk kerjasama lingkup dalam negeri adalah seluruh naskah kerjasama yang terinventarisir dan terdokumentasikan di Bagian Kerjasama yaitu terhitung sejak tahun 2007, dengan bentuk naskah, baik Kesepakatan Bersama, Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerjasama, maupun bentuk perikatan hukum lainnya.</p> <p>Yang dimaksud dengan suatu naskah kerjasama lingkup dalam negeri sudah terimplementasikan atau ditindaklanjuti oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Minimal satu dari seluruh ruang lingkup Nota Kesepahaman atau Kesepakatan Bersama aktif ditindaklanjuti oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dalam bentuk Perjanjian Kerjasama, atau</li> <li>minimal satu dari seluruh ruang lingkup Perjanjian kerjasama aktif dalam naskah kerjasama aktif ditindaklanjuti oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dalam bentuk tindakan nyata dalam program/kegiatan SKPD., atau</li> <li>minimal satu dari seluruh ruang lingkup Nota Kesepahaman atau Kesepakatan Bersama aktif ditindaklanjuti oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dalam bentuk tindakan nyata dalam program/kegiatan SKPD, walaupun tidak/belum ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerjasama.</li> </ol>

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN / KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
				monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah lingkup kerjasama. Oleh karena itu implementasi kerjasama yang telah dibuat sudah barang tentu menjadi indikator kinerja bagi Bagian Kerjasama untuk mengetahui efektivitas kerjasama aktif yang telah dibuat. Kolaborasi atau kerjasama merupakan salah satu pilar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bandung.			
6.	Meningkatnya kualitas administrasi pembangunan	Persentase SKPD yang melaksanakan PBJ melalui ULP dan BIRMS	%	.	Jumlah SKPD yang menyusun RUP melaksanakan lelang melalui ULP dan BIRMS dibandingkan dengan seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung	Sekretariat Daerah	
7.	Berkembangnya ekonomi kreatif untuk mendukung tercapainya Bandung sebagai Kota Kreatif	Persentase aktivasi sub sektor ekonomi kreatif	%	.	Jumlah sub sector ekonomi kreatif yang diaktivasi dibandingkan seluruh jenis sub sector ekonomi kreatif	Sekretariat Daerah	

## 2. SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN / KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung	Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan	%	Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2004	$\frac{\text{Jml. Dewan yg Puas}}{\text{Jml. Anggota DPRD}} \times 100\%$	Sekretariat DPRD Kota Bandung	<p>Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bandung No. 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan susunan organisasi, Sekretariat Daerah Kota Bandung. Sekretaris DPRD Kota Bandung mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, penyelenggaraan kehumasan dan protokol lingkup DPRD dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Sekretariat DPRD Kota Bandung mempunyai fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;</li> <li>b. Penyelenggaraan administrasi keuangan.</li> <li>c. Penyelenggaraan kehumasan dan protocol lingkup DPRD;</li> <li>d. Penyelenggaraan rapat-rapat di lingkungan DPRD; dan</li> <li>e. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian</li> </ol>

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							tenaga ahli yang diperlukan dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD
.		Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu	%	<p>Berdasarkan Program Legislasi Daerah (PROLEGDA) Tahun 2014 berjumlah 10 buah, dimana dalam 1 prolegda ditetapkan 4 (empat) kali Rapat Paripurna, jadi target Rapat Paripurna sebanyak 40 kali. Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan dengan perhitungan target 8 kali rapat dalam sebulan dikalikan 12 bulan dan dikalikan total AKD sebanyak 9 berjumlah 864 kali rapat. Ditambah 2 kali Rapat Paripurna Istimewa yaitu dalam rangka Hari Jadi Kota Bandung dan Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI.</p> <p>Seluruh pelaksanaan kegiatan rapat-rapat tiap bulannya telah terjadwal sehingga dapat dilakukan persiapan oleh Sekretariat DPRD Kota Bandung dan dilaksanakan tepat waktu.</p>	<u>Rapat yang terlaksana X</u> 100% jml. Rapat yang terjadwalkan	Sekretariat DPRD Kota Bandung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat Paripurna dalam rangka Pembahasan RAPERDA 4 kali dalam pembahasan 1 RAPERDA</li> <li>2. Rapat Paripurna Istimewa 2 kali untuk Hari Jadi Kota Bandung dan Mendengarkan Pidato Kenegaraan</li> <li>3. Rapat Alat Kelengkapan Dewan 8 kali dalam sebulan untuk 9 AKD.</li> </ol>
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat kepada dewan	Persentase fasilitasi keluhan/pengaduan masyarakat	%	Sekretariat DPRD sebagai fasilitator DPRD hanya memiliki wewenang terhadap fasilitasi penyampaian aspirasi dari masyarakat saja, jadi maksud dari keluhan/pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti adalah aspirasi yang tersampaikan	<u>Jumlah aspirasi yg di tindaklanjuti kpd Dewan X</u> 100%  Jumlah aspirasi yang masuk	Sekretariat DPRD Kota Bandung	<p>Aspirasi yang masuk terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aspirasi Pengaduan</li> <li>2. Aspirasi masukan terhadap penyusunan RAPERDA yang sedang dibahas dewan</li> </ol>

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
				<p>kepada dewan.</p> <p>Sedangkan untuk tidak lanjut terhadap aspirasi itu sendiri bukan merupakan core dari Sekretariat DPRD, itu merupakan core dari DPRD.</p>			

### 3. INSPEKTORAT

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Menurunnya temuan pemeriksaan kasus tindak pidana korupsi	Persentase SKPD yang tidak mendapat temuan berindikasi tindak pidana korupsi yang material	%	Masih terdapat SKPD yang masih memiliki temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi (berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam kerangka Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2013)	(Jumlah SKPD yang tidak mendapat temuan berindikasi tindak pidana korupsi yang material di bagi jumlah SKPD) dikali 100%	Inspektorat Kota Bandung	SKPD yang memiliki temuan BPK RI yang material sebesar $\geq 1\%$ dan SKPD dikatakan tidak lagi mendapatkan temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang material, jika SKPD tersebut pada tahun penetapan pencapaian indikator, tidak lagi memiliki temuan BPK RI yang berindikasi tindak pidana korupsi yang material
2.	Meningkatnya implementasi SPIP	Persentase SKPD yang telah mengimplementasikan SPIP pada level berkembang	%	Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di jajaran SKPD	(Jumlah SKPD yang telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) SKPD dibagi Jumlah Seluruh SKPD) dikali 100%	Inspektorat Kota Bandung	SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, yang telah menyusun SOP
3.	Meningkatnya kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang telah ditindaklanjuti	%	Belum optimalnya SKPD yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan internal	(Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang mendapatkan status tindak lanjut selesai dibagi Jumlah seluruh rekomendasi) x 100%	Inspektorat Kota Bandung	SKPD yang telah menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan internal

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
	pemeriksaan internal dan eksternal						
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang telah ditindaklanjuti	%	Belum optimalnya SKPD yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal	(Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang mendapatkan status tindak lanjut selesai dibagi Jumlah seluruh rekomendasi) x 100%	Inspektorat Kota Bandung	SKPD yang telah menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal
4.	Meningkatnya tertib administrasi barang	Persentase SKPD yang Tertib administrasi barang/aset daerah	%	Belum optimalnya tertib administrasi barang/aset daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung	(Jumlah SKPD yang tidak mempunyai temuan administrasi barang/aset dibagi Jumlah seluruh SKPD) dikali 100%	Inspektorat Kota Bandung	SKPD yang tidak memiliki temuan dalam aspek barang daerah
5.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Bandung	Persentase SKPD yang memiliki Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat Minimal B	%	Belum optimalnya implementasi SAKIP pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung	(Jumlah SKPD yang nilai evaluasi AKIP nya minimal B dibagi jumlah seluruh SKPD pada Pemerintah Kota Bandung yang dievaluasi) x 100%	Inspektorat Kota Bandung	SKPD yang memiliki Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat Minimal B
6.	Meningkatnya Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi	Persentase Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi	%	Perlunya peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam pendidikan dan latihan pengembangan profesi	(Jumlah APIP yang memiliki standar kompetensi dibagi jumlah seluruh APIP Inspektorat) x 100%	Inspektorat Kota Bandung	Jumlah APIP yang telah memiliki Standar kompetensi
7.	Meningkatnya Kepuasan stakeholder	Persentase SKPD yang menyatakan puas atas layanan Inspektorat kota Bandung	%	Perlunya Peningkatan pelayanan Inspektorat kepada SKPD	(Jumlah SKPD yang menyatakan puas dibagi jumlah seluruh SKPD) x 100%	Inspektorat Kota Bandung	Meningkatnya kepuasan SKPD atas layanan Inspektorat kota Bandung
		Persentase Aduan masyarakat atas Pelayanan publik yang ditindaklanjuti dalam waktu 14 hari	%	Perlunya peningkatan pelayanan Inspektorat Kota Bandung atas Pengaduan Masyarakat terhadap proses pembangunan Kota Bandung	(Jumlah aduan masyarakat atas pelayanan publik yang ditindaklanjuti dalam waktu 14 hari dibagi jumlah aduan masyarakat atas layanan publik yang diterima Inspektorat) x 100%	Inspektorat Kota Bandung	Meningkatnya Kepuasan Stakeholder atas layanan publik yang ditindaklanjuti dalam 14 hari

#### 4. SATPOL PP

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya ketertiban umum	Cakupan Penyelesaian Penegakan Perda	%	<p>Tertib adalah kondisi dimana semua peraturan yang berlaku dipatuhi oleh masyarakatnya. Kondisi tersebut dapat terwujud dengan kesadaran sendiri dari masyarakat maupun dengan paksaan oleh petugas.</p> <p>Satpol PP sebagai Penegak Peraturan Daerah, melakukan upaya mewujudkan kondisi Tertib dengan cara menyelesaikan setiap pelanggaran yang dilaporkan.</p> <p>Semakin tinggi prosentase tingkat penyelesaian Penegakan Peraturan Daerah yang dilaporkan, maka semakin tinggi pula tingkat pencapaian kondisi Tertib di Kota Bandung.</p>	Jumlah penyelesaian pelanggaran perda perwal / jumlah pelanggaran perda perwal yang dilaporkan X 100%	Satuan Polisi Pamong Praja	<p>1. Yang dimaksud dengan Penyelesaian adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Respon atas laporan,</li> <li>○ Pengecekan atas validitas laporan,</li> <li>○ Tindaklanjut di lapangan oleh petugas dan/atau PPNS,</li> <li>○ Pembuatan Surat Pernyataan untuk tidak melanggar atau,</li> <li>○ Pengenaan biaya paksa atau penyerahan ke pengadilan.</li> </ul> <p>2. Yang dimaksud dengan Pelanggaran yang dilaporkan adalah laporan adanya pelanggaran Peraturan Daerah yang berasal dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Laporan masyarakat yang masuk melalui LAPOR, Tlp, surat, datang langsung, Media Massa/Sosial dll.,</li> <li>○ Rekomendasi dari SKPD pengawas dan pengendali terkait dan</li> <li>○ Perintah Atasan dan/atau Temuan Petugas Satpolpp langsung di Lapangan tentang adanya Pelanggaran Peraturan Daerah.</li> </ul>
.		Persentase zona merah tingkat kota yang tertib	%	Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL	Jumlah Zona Merah tingkat Kota yang Tertib /jumlah Zona Merah tingkat Kota X 100%	Satuan Polisi Pamong Praja	<p>Zona Merah adalah Lokasi yang dilarang atau tidak boleh terdapat PKL</p> <p>1. Karakter PKL:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perlengkapan dagang mudah dibongkar pasang atau dipindahkan;</li> <li>b. mempergunakan bagian jalan, trotoar, dan/atau tempat lain untuk kepentingan umum yang bukan diperuntukkan bagi tempat berdagang secara tetap</li> </ul> <p>2. Sarana berdagang PKL:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tenda makanan;</li> <li>b. Gerobak, atau</li> <li>c. Deprokan/Lesehan</li> </ul>
.		Persentase kawasan bebas reklame yang tertib	%	Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame	Jumlah Kawasan Bebas Reklame yang Tertib / Jumlah Kawasan Bebas Reklame X	Satuan Polisi Pamong Praja	Kawasan yang tidak diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame yaitu gedung dan/atau halaman kantor pemerintahan, tempat pendidikan, tempat-tempat ibadah, lintasan jalan kereta api, rumah sakit, Kantor militer/kepolisian, taman kota, Jalan Asia Afrika, Jalan Braga, Jalan R.A.A Wiranatakusumah, Jalan Pajajaran, Jalan Ir. H. Juanda, Jalan Dr. Junjuran dan Jalan Pasteur

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN / KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
					100%		
2.	Meningkatnya ketentraman masyarakat	Persentase kecamatan yg melampaui SPM rasio linmas	%	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Kecamatan yang mempunyai rasio anggota Linmas sesuai SPM / Jumlah Kecamatan X 100%	Satuan Polisi Pamong Praja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Desa/Lurah merekrut calon Anggota Satlinmas di Desa/Kelurahan</li> <li>2. Calon Anggota Satlinmas di rekrut dari Warga Masyarakat</li> <li>3. Anggota Satlinmas dilantik oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja</li> <li>4. Masa keanggotaan Satlinmas berakhir pada usia 60 (enam puluh) tahun</li> <li>5. Satlinmas mempunyai tugas: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Membantu dalam penanggulangan bencana;</li> <li>o Membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;</li> <li>o Membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;</li> <li>o Membantu penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu; dan</li> <li>o Membantu upaya pertahanan Negara</li> </ul> </li> </ol>
3.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Laporan yang diindaklanjuti dalam 24 jam	%	Banyaknya pengaduan masyarakat dalam hal ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui media sosial seperti LAPOR, Tweeter, Facebook, Whatsap	Jumlah Laporan yang ditindaklanjuti dalam 24 jam / Jumlah Laporan yang Diterima X 100%	Satuan Polisi Pamong Praja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan yang ditindaklanjuti dalam 24 jam adalah jika waktu ketika diterimanya sebuah Laporan sampai dengan waktu Laporan tersebut ditindaklanjuti, mempunyai rentang waktu kurang dari 24 jam. <ul style="list-style-type: none"> <li>o Jam tindaklanjuti laporan - Jam diterima Laporan &lt; 24</li> </ul> </li> <li>2. Laporan yang diterima adalah: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Masyarakat melaporkan langsung, melalui surat, tlp, sms, LAPOR, media massa dan/atau media sosial;</li> <li>o Perintah Atasan atau Rekomendasi SKPD; dan</li> <li>o Temuan petugas Satpolpp/PPNS.</li> </ul> </li> </ol>

## 5. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN / KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Peningkatan kompetensi sumber daya manusia Aparatur Sipil	#Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi :# -	%	Sesuai dengan amanat PP Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Diklat Aparatur bahwa setiap aparatur harus memenuhi persyaratan kompetensi baik manajerial maupun fungsional	Jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat kompetensi manajerial (Diklat PIM Tk. I, Tk. II, Tk. III, Tk. IV) dibagi dengan jumlah pejabat struktural x 100%	Badan Kepegawaian Daerah	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
	Negara	Kompetensi manajerial					
.		#Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi :# - Kompetensi teknis	%	Sesuai dengan amanat PP 101/2000 tentang Diklat Aparatur bahwa setiap aparatur harus memenuhi persyaratan kompetensi baik manajerial maupun teknis	Jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi teknis (diklat teknis tugas dan fungsi + diklat fungsional) dibagi dengan jumlah PNS seluruhnya x 100%	Badan Kepegawaian Daerah	
.		Jumlah pegawai ASN yang mengikuti tugas belajar sesuai dengan kebutuhan formasi	Orang	bahwa standar kompetensi teknis meliputi peningkatan pendidikan yang salah satunya melalui tugas belajar	Jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar	Badan Kepegawaian Daerah	
2.	Tersedianya Aparatur Sipil Negara yang memenuhi standar kompetensi	Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi	%	Diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertujuan untuk menempatkan SDM yang tepat sesuai dengan minat dan kemampuannya yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja melalui proses promosi dan mutasi secara fair dan objektif. Penempatan dalam jabatan sesuai dengan kompetensi berpengaruh terhadap peningkatan prestasi kerja dan kinerja pegawai yang merupakan faktor penting dalam organisasi karena dapat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai pelayanan yang prima pada masyarakat.	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kompetensi dibagi dengan jumlah PNS seluruhnya	Badan Kepegawaian Daerah	
3.	Meningkatnya disiplin pegawai ASN	Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin pegawai ASN	%	Untuk menjamin penegakan disiplin sesuai dengan amanat PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai	Jumlah kasus yang ditangani dibagi dengan jumlah kasus	Badan Kepegawaian Daerah	
.		Persentase SKPD yang tidak terdapat pelanggaran disiplin	%	Untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja PNS	Jumlah SKPD yang tidak terdapat pelanggaran disiplin dibagi dengan jumlah total SKPD	Badan Kepegawaian Daerah	
.		Persentase tingkat kehadiran pegawai ASN	%	Untuk mengukur tingkat kepatuhan pegawai melalui SIAP (Sistem Informasi Administrasi Presensi) yakni sistem absensi dengan melakukan perekaman wajah dan sidik jari yang terintegrasi ke seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.	Persentase kehadiran PNS per bulan dibagi jumlah bulan	Badan Kepegawaian Daerah	
4.	Meningkatnya pemenuhan hak-hak kepegawaian ASN	Persentase pegawai yang terpenuhi hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku	%	Untuk meningkatkan motivasi kerja pegawai.	(Jumlah pegawai yang sudah terpenuhi hak cuti+ jumlah PNS yang melaksanakan sumpah janji + jumlah PNS yang terpenuhi hak TPPNS+jumlah jabatan yang telah dievaluasi dan disusun nilai dan kelas jabatannya+jumlah PNS yang memiliki PPKPNS dibagi dengan (nominatif jumlah pegawai yang seharusnya cuti+seharusnya melaksanakan sumpah janji+seharusnya	Badan Kepegawaian Daerah	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
					memperoleh TPPNS+ jabatan yang seharusnya dievaluasi dan disusun nilai dan kelas jabatannya+seharusnya memiliki PPKPNS)		
5.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian	#Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu:#- Persentase kenaikan pangkat pegawai tepat waktu	%	Untuk mencapai pelayanan prima dan pemenuhan administrasi kepegawaian serta sesuai dengan amanat :  - PP Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan pangkat PNS	Jumlah usulan kenaikan pangkat pegawai selesai tepat waktu dibagi dengan jumlah usulan kenaikan pangkat pegawai	Badan Kepegawaian Daerah	
.		#Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu:#- Persentase kenaikan gaji berkala pegawai tepat waktu	%	Untuk mencapai pelayanan prima dan pemenuhan administrasi kepegawaian serta sesuai dengan amanat PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012	Jumlah usulan kenaikan gaji berkala pegawai selesai tepat waktu dibagi dengan jumlah usulan kenaikan gaji berkala pegawai	Badan Kepegawaian Daerah	
.		#Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu:#- Persentase pensiun pegawai tepat waktu	%	Untuk mencapai pelayanan prima dan pemenuhan administrasi kepegawaian serta sesuai dengan amanat PP Nomor 19 Tahun 2013 tentang perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS	Jumlah usulan pensiun pegawai selesai tepat waktu dibagi dengan jumlah usulan pensiun pegawai	Badan Kepegawaian Daerah	
.		Indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian	Indeks	Sesuai amanat UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka BKD sebagai lembaga pelayanan publik berorientasi pada kepuasan masyarakat/pelanggan melalui pengukuran kepuasan pelayanan dimana masyarakat yang dimaksud adalah PNS Kota Bandung	Hasil survey/kuesioner dari pengguna pelayanan (PNS Kota Bandung)	Badan Kepegawaian Daerah	
6.	Tersedianya akurasi data kepegawaian	Persentase pegawai yang datanya akurat	%	Akurasi data kepegawaian diperlukan sebagai bahan perencanaan manajemen kepegawaian dan sesuai dengan amanat UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Jumlah pegawai yang datanya akurat dibagi dengan jumlah pegawai	Badan Kepegawaian Daerah	

## 6. BAPPEDA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	%	Harus ada sinkronisasi antar dokumen perencanaan, program-program dalam dokumen perencanaan jangka panjang harus sinkron dengan program dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan rencana tahunan (Permendagri Nomor 54 Tahun 2010)	<p>Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD = <math>(Ki_1+Ki_2+Ki_3+Ki_4+Ki_5+Ki_6)/6</math></p> <p><math>Ki_1 = \frac{\text{Keselarasan Sasaran Jumlah Sasaran Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah Sasaran pada RPJMD}} \times 100\%</math></p> <p><math>Ki_2 = \frac{\text{Keselarasan Indikator Sasaran Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah Indikator Sasaran pada RPJMD}} \times 100\%</math></p> <p><math>Ki_3 = \frac{\text{Keselarasan Target Jumlah Target Sasaran Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah Target Sasaran pada RPJMD}} \times 100\%</math></p> <p><math>Ki_4 = \frac{\text{Keselarasan Program Jumlah Program Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah Program pada RPJMD}} \times 100\%</math></p> <p><math>Ki_5 = \frac{\text{Keselarasan Indikator Program Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah Indikator Program pada RPJMD}} \times 100\%</math></p> <p><math>Ki_6 = \frac{\text{Keselarasan Target Jumlah Target Program Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah Target Program pada RPJMD}} \times 100\%</math></p>	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
.		Tingkat keselarasan Renstra SKPD terhadap RPJMD	%	Harus ada sinkronisasi antar dokumen perencanaan, program-program dalam dokumen perencanaan jangka panjang harus sinkron dengan program dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan rencana tahunan (Permendagri	<p>Tingkat Keselarasan Renstra SKPD terhadap RPJMD = <math>(Ki_1+Ki_2+Ki_3+Ki_4+Ki_5+Ki_6)/6</math></p> <p><math>Ki_1 = \frac{\text{Keselarasan Jumlah Sasaran Pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah Sasaran pada RPJMD}} \times 100\%</math></p> <p><math>Ki_2 = \frac{\text{Keselarasan Jumlah Indikator Sasaran Pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah Indikator Sasaran pada RPJMD}} \times 100\%</math></p> <p><math>Ki_3 = \frac{\text{Keselarasan Jumlah Target Sasaran Pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah Target Sasaran pada RPJMD}} \times 100\%</math></p> <p><math>Ki_4 = \frac{\text{Keselarasan Jumlah Program Pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah Program pada RPJMD}} \times 100\%</math></p> <p><math>Ki_5 = \frac{\text{Keselarasan Jumlah Indikator Program Pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah Indikator Program pada RPJMD}} \times 100\%</math></p>	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN / KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
				Nomor 54 Tahun 2010)	<p>Indikator Program = Jumlah Indikator Program pada RPJMD</p> <p><math>Ki_6 = \frac{\text{Keselarasan Jumlah Target Program Pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah Target Program pada RPJMD}} \times 100 \%</math></p>		
.		Tingkat keselarasan Renja SKPD terhadap RKPDP	%	Harus ada sinkronisasi antar dokumen perencanaan, program-program dalam dokumen perencanaan jangka panjang harus sinkron dengan program dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan rencana tahunan (Permendagri Nomor 54 Tahun 2010)	<p>Tingkat Keselarasan Renja SKPD terhadap RKPDP = <math>(K11+K12+K13+K14+K15+K16)/6</math></p> <p><math>K11 = \frac{\text{Keselarasan Jumlah Program Pada Renja yang sesuai dengan RKPDP}}{\text{Jumlah Program pada RKPDP}} \times 100 \%</math></p> <p><math>K12 = \frac{\text{Keselarasan Jumlah Indikator Program Pada Renja yang sesuai dengan RKPDP}}{\text{Jumlah Indikator Program pada RKPDP}} \times 100 \%</math></p> <p><math>K13 = \frac{\text{Keselarasan Target Jumlah Target Program Pada RKPDP yang sesuai dengan Renja}}{\text{Jumlah Target Program pada RKPDP}} \times 100 \%</math></p> <p><math>K14 = \frac{\text{Keselarasan Jumlah Kegiatan Pada Renja yang sesuai dengan RKPDP}}{\text{Jumlah Kegiatan pada RKPDP}} \times 100 \%</math></p> <p><math>K15 = \frac{\text{Keselarasan Jumlah Indikator Kegiatan Pada Renja SKPD yang sesuai dengan RKPDP}}{\text{Jumlah Indikator Kegiatan pada RKPDP}} \times 100 \%</math></p> <p><math>K16 = \frac{\text{Keselarasan Target Jumlah Target Kegiatan Pada Renja SKPD yang sesuai dengan RKPDP}}{\text{Jumlah Target Kegiatan Pada RKPDP}} \times 100 \%</math></p>	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
2.	Terakomodasi aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah	Persentase Pagu Belanja Langsung RKPDP yang Mengakomodir	%	Berdasarkan Perda No.5 Tahun 2009, Usulan masyarakat melalui musrenbang harus	<p>Tingkat aspirasi = <math>\frac{\text{Jumlah alokasi anggaran untuk kegiatan yang berasal dari aspirasi masyarakat}}{\text{Total Pagu Belanja Langsung RKPDP}} \times 100 \%</math></p>	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN / KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
		Usulan Masyarakat Melalui Musrenbang		diakomodir minimal 30 % dari Belanja Langsung.			
3.	Terlaksananya program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan	Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan yang Sesuai dengan perencanaan	%	Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 2010 Pasal 254: Kepala Bappeda kabupaten/kota melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah lingkup kabupaten/kota Oleh karena itu, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi tingkat pelaksanaan program SKPD.	<p align="center"><b>Jumlah Program yang Dilaksanakan oleh SKPD X 100 %</b></p> <p align="center"><b>Jumlah Program yang Direncanakan dalam RKPD</b></p>	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

## 7. Badan Pemberdayaan Perempuan & KB

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN / KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya kualitas hidup perempuan yang berkeadilan gender	indeks pembangunan gender	%	Indek Pembangunan Gender (IDG) masuk dalam IKU karena IDG adalah sebagai tolak ukur keberhasilan program pengarusutamaan gender yang dilaksanakan di kota bandung walaupun tidak melaksanakan pengukuran IDG, namun BPPKB Kota Bandung sebagai	<p><b>INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IDG) :</b></p> <p>1. umur panjang dan sehat : 1. indikator : angka harapan hidup perempuan, angka harapan hidup laki-laki 2. indeks dimensi : indeks harapan hidup perempuan, indeks harapan hidup laki-laki 3. indeks sebaran</p>	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/ KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
				koordinatar dalam pelaksanaan program tersebut.	merata : indeks atau harapan hidup dengan sebaran merata 2. pengetahuan : 1. Indikator : AMH perempuan, MYS perempuan, AMH laki-laki, MYS laki-laki. 2. indeks dimensi : indeks pendidikan perempuan, indeks pendidikan laki-laki 3. indeks sebaran merata : indeks pendidikan dengan sebaran merata 3. kehidupan yang layak: 1. indikator : perkiraan pendapatan perempuan, perkiraan pendapatan laki-laki 2. indeks dimensi : indeks pendapatan perempuan, indeks pendapatan laki-laki 3. indeks sebaran merata : indeks pendapatan dengan sebaran merata		
2.	Meningkatnya pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak korban tindak kekerasan	cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang terselesaikan penanganannya pada unit pelayanan terpadu	%	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang terselesaikan penanganannya pada unit pelayanan terpadu dijadikan IKU karena : 1. Sesuai dengan Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 2. Melaksanakan amanat dari Visi dan Misi BPPKB Kota Bandung; 3. BPPKB Kota Bandung mempunyai UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai pusat pelayanan penanganan pengaduan kepada pelapor atas tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak.	perempuan dan anak korban kekerasan yang terselesaikan penanganannya dibagi perempuan dan anak korban kekerasan yang melapor x 100%	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	
3.	Terwujudnya Kota Bandung sebagai Kota Layak Anak	persentase kelurahan layak anak	%	Persentase Kelurahan Layak Anak adalah dalam rangka mendukung Kota Bandung Sebagai Kota Layak Anak, maka BPPKB Kota Bandung mengawali dengan kelurahan.	jumlah penggarapan kelurahan layak anak dibagi jumlah sasaran garapan kelurahan layak anak x 100%	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	
4.	Meningkatnya pengarusutamaan gender di lingkungan pemerintah Kota Bandung	cakupan SKPD yang responsive gender	%	Cakupan SKPD yang responsif Gender dijadikan IKU dengan alasan dalam rangka mendukung program pemerintah tentang Gender yang dalam hal ini dirasakan masih kurangnya partisipasi perempuan dalam pembangunan Gender khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kesempatan kerja.	SKPD yang responsif gender dibagi seluruh SKPD x 100%	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/ KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
5.	meningkatnya peserta Keluarga Berencana	tingkat penurunan TFR	%	Tingkat penurunan TFR adalah hal yang wajib masuk dalam IKU karena menyangkut Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Bandung dan BPPKB Kota Bandung adalah salah satu SKPD yang mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui Program KB.	$5 \sum ASFR$ (jumlah kelahiran dari usia ibu 19-49) x5 dibagi 1000 kelahiran x 100%	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	
.		persentase pasangan usia subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif	%	Persentase pasangan usia subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif masuk dalam IKU adalah dalam rangka melaksanakan Program KB dalam Pengendalian Penduduk dan dalam rangka melaksanakan amanat Visi dan Misi BPPKB Kota Bandung.	jumlah peserta KB aktif dibagi jumlah pasangan usia subur x100%	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	
6.	meningkatnya pemahaman remaja dalam kesehatan reproduksi dan pendewasaan usia perkawinan (PUP)	rata-rata usia kawin pertama	Tahun	Rata-rata usia kawin pertama dijadikan IKU adalah dalam rangka melaksanakan Program KB dalam Pengendalian Penduduk dengan sasaran kepada para remaja untuk tidak kawin muda atau Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP).	jumlah kelompok umur yang pertama kawin (16s/d35) dibagi jumlah tahun kawin pertama	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	
7.	meningkatnya kelompok bina keluarga yang menggerakkan partisipasi masyarakat	persentase bina keluarga balita (BKB), bina keluarga Remaja (BKR), bina keluarga lansia (BKL) yang aktif	%	Persentase bina keluarga balita (BKB), bina keluarga Remaja (BKR), bina keluarga lansia (BKL) yang aktif angkat sebagai IKU dengan alasan untuk memperkuat Ketahanan Keluarga yang sarannya Balita, Remaja dan Lansia	anggota bina keluarga balita yang ber KB dibagi seluruh pasangan subur anggota bina keluarga balita x 100%	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	
8.	Meningkatnya tahapan keluarga pra sejahtera dan KS I	persentase keluarga pra sejahtera dan KS I	%	Persentase keluarga pra sejahtera dan KS I dijadikan IKU dengan alasan untuk ikut dalam program Pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan maka dalam hal ini BPPKB Kota Bandung mempunyai sasaran adalah keluarga dengan Kriteria Tahapan Pra Sejahtera, KS I, KS II, KS III dan KS III+, untuk Pra KS dan KS I adalah Kriteria yang dianggap atau disamakan dengan miskin maka BPPKB Kota Bandung melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung peningkatan Tahapan Keluarga.	Jumlah Pra KS dan KS 1 dibagi jumlah keluarga x 100%	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	
9.	Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	Untuk meningkatkan kinerja aparatur	Rata-rata Nilai Hasil Survey	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	
.		Persentase keluhan pengaduan layanan yang ditindaklanjuti	%	untuk lebih menyamakan pelayanan kepada Masyarakat	Jumlah Pengaduan yang masuk dibagi jumlah yang ditindaklanjuti x 100%	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN / KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
.		Indikator nilai hasil evaluasi Akip	Angka	sebagai salah satu hasil kinerja SKPD	Hasil Penilaian	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	
.		Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	%	dalam rangka pembenahan administrasi program dan keuangan pada SKPD	Jumlah temuan BPK/Inspektorat dibagi Jumlah yang ditindaklanjuti x 100%	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	

## 8. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN / KRITERIA																				
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA																					
1.	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan terpadu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	nilai	Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan perlu disusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Di samping itu data Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan perizinan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.	<p>Hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) selama satu tahun yang diikuti minimal 50% penerima layanan dengan membandingkan total dari nilai persepsi per variable dengan total variable yang terisi dikalikan dengan nilai penimbang. Terdapat 14 (empat belas) variable sesuai dengan acuan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat.</p> <p>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung melalui survey selama satu tahun yang diikuti minimal 50% penerima layanan terhadap 14 (empat belas) variable unsur pelayanan sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesesuaian biaya</li> <li>2. Kesesuaian/ketepatan waktu</li> <li>3. Kemudahan prosedur pelayanan</li> <li>4. Kemampuan petugas pelayanan</li> <li>5. Kesopanan dan keramahan petugas</li> <li>6. Kenyamanan di lingkungan unit pelayanan</li> <li>7. Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis perizinannya</li> <li>8. Kejelasan dan kepastian petugas yang melayani</li> <li>9. Kedisiplinan petugas pelayanan</li> <li>10. Tanggung jawab petugas pelayanan</li> <li>11. Kecepatan pelayanan</li> <li>12. Keadilan untuk mendapatkan pelayanan</li> </ol>	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	<p>Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan melalui survey secara langsung terhadap setiap pemohon izin. Setiap pemohon yang akan mengambil izin diwajibkan menekan tombol survey indeks kepuasan masyarakat meliputi 14 unsur yang relevan, valid, dan reliabel, sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat sebagai pengembangan dari prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 dengan mengacu kepada ketentuan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/25/M.Pan/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Adapun hasil survey kepuasan pelanggan secara keseluruhan adalah sebagai berikut.</p> <p>Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2014</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Unsur Pelayanan</th> <th>Nilai</th> <th>Kategori</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Prosedur Pelayanan</td> <td>84.69</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Persyaratan Pelayanan</td> <td>84.38</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kejelasan Petugas Pelayanan</td> <td>85.63</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Kedisiplinan Petugas Pelayanan</td> <td>84.38</td> <td>Baik</td> </tr> </tbody> </table>	No	Unsur Pelayanan	Nilai	Kategori	1	Prosedur Pelayanan	84.69	Baik	2	Persyaratan Pelayanan	84.38	Baik	3	Kejelasan Petugas Pelayanan	85.63	Sangat Baik	4	Kedisiplinan Petugas Pelayanan	84.38	Baik
No	Unsur Pelayanan	Nilai	Kategori																								
1	Prosedur Pelayanan	84.69	Baik																								
2	Persyaratan Pelayanan	84.38	Baik																								
3	Kejelasan Petugas Pelayanan	85.63	Sangat Baik																								
4	Kedisiplinan Petugas Pelayanan	84.38	Baik																								



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN / KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
				<b>Rincian waktu pelayanan perizinan BPPT Kota Bandung</b>			
				<b>No</b>	<b>Jenis Izin</b>	<b>Waktu Penyelesaian (Hari Kerja)</b>	
				1	Ijin Gangguan (HO)	12	
				2	SIUP	10	
				3	TDP	12	
				4	IUJK	12	
				5	IUI	10	
				6	TDI	12	
				7	TDG	10	
				8	Bangunan sampai dengan dua lantai	12	
				9	Bangunan memerlukan penelitian rencana arsitektur secara khusus	20	
				10	Bangunan lebih dari dua lantai	13	
				11	Bangunan bukan rumah tinggal sampai dengan 2 lantai	13	
				12	Bangunan bukan rumah tinggal dengan bentang sampai dengan 18 meter	20	
				13	Bangunan bertingkat dua lantai yang dibebaskan dari perhitungan konstruksi	20	
				14	Bangunan bertingkat atau tidak bertingkat yang memerlukan rencana konstruksi	27	
				15	Bangunan yang memerlukan rencana instalasi dan perlengkapan 30 hari kerja	43	
				16	Bangunan khusus/ tertentu	50	
				17	Ijin Lokasi	12	
				18	Izin pematangan lahan/ tanah	10	
				19	Izin penggalian ruang milik jalan (RUMIJA)	10	
				20	Izin pemanfaatan bantaran dan sempadan sungai	10	
				21	Izin konstruksi pada ruang sungai	10	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN / KRITERIA																																	
				ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA																																		
				<table border="1"> <tr> <td>22</td> <td>Izin pembuatan jalan masuk pekarangan</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>Izin pelaksanaan konstruksi yang mengubah aliran dan/atau alur sungai/saluran</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Izin pembuangan air limbah ke sungai</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>Izin pengambilan air permukaan</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>Izin pembuatan jalan di dalam kompleks perumahan, pertokoan, dan yang sejenisnya</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>27</td> <td>Izin pemanfaatan titik tiang pancang, jembatan penyebrangan orang, dan sejenisnya</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>Izin trayek</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>29</td> <td>Izin jasa titipan</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>Izin usaha angkutan</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>Izin pengelolaan tempat parkir</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>32</td> <td>Izin penyelenggaraan reklame</td> <td>12</td> </tr> </table>	22	Izin pembuatan jalan masuk pekarangan	12	23	Izin pelaksanaan konstruksi yang mengubah aliran dan/atau alur sungai/saluran	10	24	Izin pembuangan air limbah ke sungai	10	25	Izin pengambilan air permukaan	10	26	Izin pembuatan jalan di dalam kompleks perumahan, pertokoan, dan yang sejenisnya	12	27	Izin pemanfaatan titik tiang pancang, jembatan penyebrangan orang, dan sejenisnya	12	28	Izin trayek	12	29	Izin jasa titipan	12	30	Izin usaha angkutan	12	31	Izin pengelolaan tempat parkir	12	32	Izin penyelenggaraan reklame	12			
22	Izin pembuatan jalan masuk pekarangan	12																																						
23	Izin pelaksanaan konstruksi yang mengubah aliran dan/atau alur sungai/saluran	10																																						
24	Izin pembuangan air limbah ke sungai	10																																						
25	Izin pengambilan air permukaan	10																																						
26	Izin pembuatan jalan di dalam kompleks perumahan, pertokoan, dan yang sejenisnya	12																																						
27	Izin pemanfaatan titik tiang pancang, jembatan penyebrangan orang, dan sejenisnya	12																																						
28	Izin trayek	12																																						
29	Izin jasa titipan	12																																						
30	Izin usaha angkutan	12																																						
31	Izin pengelolaan tempat parkir	12																																						
32	Izin penyelenggaraan reklame	12																																						
				Waktu layanan untuk <i>herregistrasi</i> dalam Perwal Nomor 1171 ditentukan selama 4 hari kerja untuk semua jenis izin yang memerlukan <i>herregistrasi</i> .																																				
.		Penurunan Jumlah Pengaduan	%	Tingginya kepuasan masyarakat berkorelasi dengan penurunan pengaduan (komplain) terhadap layanan. Jika pemohon merasa puas terhadap layanan yang diberikan BPPT maka tentunya pemohon tidak akan memberikna pengaduan sehingga pengaduan menurun	Penurunan Pengaduan= {(Pengaduan tahun sebelumnya- Pengaduan tahun ini):Pengaduan tahun sbelumnya} x 100%	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	Pengaduan yang dimaksud dalam indikator ini adalah pengaduan berupa komplain yang merupakan bentuk ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan BPPT Kota Bandung.																																	
.		Skor kepatuhan terhadap pelayanan publik versi Ombudsman	nilai	Nilai kepatuhan terhadap pelayanan publik menunjukkan bahwa kinerja BPPT dalam memenuhi standar kepatuhan telah sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat terutama dilihat dari ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai	Nilai ini muncul berdasarkan penilaian dari Ombudsman Republik Indonesia pada setiap tahun penyelenggaraan pelayanan	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	Komponen indikator yang menjadi tolak ukur penilaian OMBUDSMAN RI:																																	



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN / KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
2.	Meningkatnya kecepatan pelayanan perizinan	Rata-rata hari penyelesaian perizinan	hari kerja	Meningkatnya kecepatan dalam pelayanan perizinan menunjukkan bahwa ada peningkatan kinerja dari seluruh SDM yang ada di BPPT	Rata-rata hari penyelesaian izin= Jumlah hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan izin : Jumlah izin yang terbit	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPPT	Nilai evaluasi AKIP	nilai	Sebagai salah satu bagian dari Pemerintah Kota Bandung, BPPT Kota Bandung wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan dan kinerja yang menjadi kewenangannya. Sebagai pengembalian amanah rakyat, BPPT Kota Bandung dituntut agar melaksanakan tugas dan fungsi untuk dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis dengan efektif dan efisien, dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga keamanan aset daerah, dan memenuhi kewajiban akuntabilitas baik keuangan maupun kinerja. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu alat pimpinan organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dengan efektif dan efisien. Dengan sistem AKIP, organisasi dituntut menyusun rencana jangka menengah beserta tujuan dan sasaran strategis yang hendak dicapai, yang kemudian dijabarkan dalam program dan kegiatan yang terarah dan berkelanjutan sehingga pencapaian tujuan dan sasaran dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu implementasi SAKIP pada BPPT Kota Bandung perlu dilakukan dengan baik.	Sesuai dengan Permenpan No.20 Tahun 2013 tentang juklak evaluasi AKIP. Sumber data berasal dari hasil evaluasi oleh inspektorat	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	
.		Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	%	Sebagai wujud dari akuntabilitas keuangan, BPPT Kota Bandung dituntut dapat menyajikan laporan keuangan yang berkualitas untuk mendukung opini BPK RI atas laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung	Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti= (Jumlah temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti : Jumlah temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti) x 100%	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	
.		Persentase tertib administrasi barang/aset daerah	%	Kendala utama yang dihadapi untuk mencapai opini laporan keuangan yang wajar tanpa pengecualian adalah permasalahan dalam administrasi aset/barang milik daerah (BMD). Pengelolaan BMD yang tidak mengikuti pedoman pengelolaan barang milik daerah menjadi penyebab yang utama. Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung, BPPT Kota Bandung perlu memusatkan perhatian pada tertib pengelolaan BMD sesuai pedoman pengelolaan BMD Kota Bandung.	Indikator "Persentase tertib administrasi barang/aset daerah" diukur dengan cara membandingkan nilai pengakuan aset pada neraca dengan rincian aset pada buku barang.	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	

**9. Badan Kesatuan Bangsa & Pemberdayaan Masyarakat**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya Organisasi Kemasyarakatan yang aktif	Prosentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	%	Sesuai Undang-undang Nomor : 17 tahun 2013 bahwa organisasi kemasyarakatan harus menjadi mitra pemerintah untuk memfasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka dari itu supaya tiga hal tersebut dapat tercapai maka organisasi masyarakat harus dibina supaya lebih aktif dalam membantu program-program pemerintah dengan kata lain menjad imitra Pemerintah	$(X/Y) \times 100\%$  X= jumlah ormas/okp/lsm yang terdaftar dan Aktif *  Y= jumlah ormas/okp/lsm terdaftar	Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat	Ormas/OKP/LSM Aktif :  Membuat Program Kerja  Melakukan pelatihan  3. Melakukan pelaporan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan
2.	Meningkatnya Swadaya Murni dan Peran Masyarakat	Prosentase Peningkatan Kontribusi Swadaya Murni Masyarakat dalam membangun kewilayahan	%	Untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	$((X_0-X_1)/X_1) \times 100\%$  X <sub>0</sub> = jumlah swadaya tahun berjalan  X <sub>1</sub> = jumlah swadaya tahun Lalu	Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat	
.		Prosentase TP. PKK Kelurahan yang aktif	%	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga.  Pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK merupakan upaya memandirikan masyarakat dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan	$(X/Y) \times 100\%$  X= jumlah PKK Aktif *  Y= jumlah PKK tingkat Kelurahan	Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat	PKK Aktif :  Membuat Program Kerja tahunan  Menyampaikan 10 Program PKK kepada masyarakat melalui kegiatan penyuluhan Monitoring hasil kegiatan Melakukan pelaporan triwulan ke kecamatan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
.		Prosentase LPM kelurahan yang aktif	%	LPM adalah sebagai motor penggerak dan mitra pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pembangunan masyarakat Kelurahan. (Permendagri Nomor : 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan)	$(X/Y) \times 100\%$ X= jumlah LPM Aktif * Y= jumlah LPM tingkat Kelurahan	Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat	LPM Aktif :  Mengadakan Pembinaan Terbatasnya tim pelaksana kegiatan swadaya
3.	Menurunnya Angka Kemiskinan	Prosentase Penurunan Penduduk Miskin	%	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis.  Angka Kemiskinan di Kota Bandung Tahun 2013 adalah 7,94 %.	$((X_1 - X_0) / X_1) \times 100\%$  X <sub>0</sub> = jumlah Penduduk Miskin tahun berjalan X <sub>1</sub> = jumlah Penduduk Miskin tahun Lalu  $y = x_0 - x_1$  X <sub>0</sub> = Prosentase Penduduk miskin tahun sebelumnya X <sub>1</sub> = Prosentase Penduduk miskin tahun berjalan  y = selisih (meningkat/ menu run)	Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat	Kriteria Miskin berdasarkan BPS, seseorang dikategorikan miskin kalau memenuhi minimal 9 kriteria dari 14 kriteria  1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m <sup>2</sup> per orang; 2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan; 3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/ tembok tanpa diplester; 4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain; 5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik; 6. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan; 7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah; 8. Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu; 9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun; 10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari; 11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik; 12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m <sup>2</sup> , buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan 13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD; 14. Tidak memiliki tabungan/ barang

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN / KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya;  <i>Jika minimal 9 variabel terpenuhi maka suatu rumah tangga dikategorikan miskin</i>
4.	Peningkatan Tertib Administrasi dan Pelayanan Kepada Masyarakat/ Publik sesuai tupoksi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	Sebagai Pelayan Masyarakat, harus tahu tingkat kepuasan masyarakat	Data Survei	Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat	

## 10. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN / KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Terjaganya kualitas lingkungan sehingga tetap memenuhi baku mutu lingkungann	Tingkat kualitas udara ambien titik pantau memenuhi baku mutu	%	Termasuk ke dalam target RPJPD Kota Bandung Tahap III 2013-2018	(Kualitas udara di titik pantau yang memenuhi baku mutu / Jumlah titik kualitas udara yang dipantau) x 100 %	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pencatatan hasil monitoring oleh BPLH Kota Bandung
.		Tingkat emisi gas rumah kaca (GRK) menurun	%	Target penurunan emisi Gas Rumah Kaca Nasional	(Konsentrasi gas penyebab rumah kaca tahun berjalan / Konsentrasi tahun sebelumnya gas penyebab rumah kaca) x 100 %	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Hasil inventarisasi dan kajian oleh BPLH Kota Bandung
.		Jumlah sungai utama kualitas airnya memenuhi status mutu kelas IV golongan B	%	Termasuk ke dalam target RPJPD Kota Bandung Tahap III 2013-2018	(Jumlah sungai yang memenuhi baku mutu kelas IV Golongan B / 16 sungai utama di Kota Bandung) x 100 %	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Hasil pengolahan data pemantauan kualitas sungai oleh BPLH Kota Bandung
2.	Meningkatnya pengelolaan sampah perkotaan berbasis teknologi ramah lingkungan	Cakupan sampah yang dikelola secara landfill	%	Termasuk ke dalam target RPJPD Kota Bandung Tahap III 2013-2018	(Jumlah tonase sampah yang diangkut ke TPA per Tahun / Jumlah tonase sampah kota per tahun) x 100 %	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pencatatan operasional PD. Kebersihan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
.		Cakupan sampah yang dikelola dengan pola Reduce, Reuse, Recycle (3R )	%	Termasuk ke dalam target RPJPD Kota Bandung Tahap III 2013-2018	(Jumlah tonase sampah yang diolah secara 3R per tahun / Jumlah tonase sampah kota per tahun) x 100 %	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Rekapitulasi data dari masing-masing kecamatan dan pencatatan BPLH serta operasional PD. Kebersihan
.		Cakupan sampah dikonversi menjadi energi dengan teknologi ramah lingkungan	%	Termasuk ke dalam target RPJPD Kota Bandung Tahap III 2013-2018	(Jumlah tonase sampah yang diolah dengan WTE per tahun / Jumlah tonase sampah kota per tahun) x 100 %	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pendataan di masing-masing operasional WTE oleh BPLH Kota Bandung
3.	Terjaganya kelestarian dan fungsi lingkungan hidup	Tingkat muka air tanah (MAT)	Bawah Muka Tanah	Merupakan Misi pada Renstra BPLH 2013-2018	Pengukuran level muka air tanah	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Hasil kajian mengenai tingkat penurunan muka air tanah
.		Mata air yang terlindungi	%	Merupakan Misi pada Renstra BPLH 2013-2018	(Jumlah mata air yang dilindungi / 25 mata air prioritas yang dilindungi) x 100 %	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Laporan pelaksanaan kegiatan perlindungan mata air

## 11. Kantor Perpustakaan & Arsip Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	Persentase pemustaka pertahun	%	Rendahnya minat baca masyarakat Kota Bandung sehingga perlu dimotivasi dan difasilitasi oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung melalui Buku yang Up to date	<u>Jumlah Pemustaka</u> Jumlah Penduduk Kota Bandung Usia 5-59 Th  X 100 %	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	untuk memberikan gambaran prosentase jumlah kunjungan pemustaka baik yang hadir ke perpustakaan umum maupun ke perpustakaan-perpustakaan hasil binaan Kantor Pusarda seperti: Taman Bacaan, mobil Unit Perpustakaan Keliling, Perpustakaan Kelurahan, Library In The Boks. dibandingkan dengan jumlah penduduk yang harus dilayani mencakup usia 5-59 tahun.
2.	Meningkatnya Keanekaragaman Bahan Pustaka	Jumlah Koleksi Bahan Pustaka	Judul	penambahan koleksi bahan pustaka (buku) dilakukan setia tahun untuk memberikan pilihan literasi bahan bacaan kepada Masyarakat dalam menentukan pilihannya.	Akumulasi Jumlah Koleksi Bahan Pustaka	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	Pengayaan bahan pustaka diharapkan secara bertahap akan mampu memenuhi kebutuhan bahan bacaan masyarakat
.		Jumlah Koleksi Bahan Pustaka	Eksemplar	penambahan koleksi bahan pustaka (buku) dilakukan setia tahun untuk memberikan pilihan literasi bahan bacaan	Akumulasi Jumlah Koleksi Bahan Pustaka	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	Pengayaan bahan pustaka diharapkan secara bertahap akan mampu memenuhi kebutuhan bahan bacaan masyarakat

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
				kepada Masyarakat dalam menentukan pilihannya.			
3.	Meningkatnya Kualitas Perpustakaan Kelurahan	Prosentase Perpustakaan Kelurahan yang Aktif	%	Untuk mengukur keberhasilan pembinaan perpustakaan kelurahan sekaligus untuk memotivasi perpustakaan kelurahan yang belum aktif sebagai target pembinaan.	<u>Jumlah Perpustakaan Kelurahan Yang Aktif</u> Seluruh Kelurahan  X 100%	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	Ukuran keberhasilan pembinaan perpustakaan kelurahan yang aktif ditentukan oleh kriteria : SK. Pengelola Perpustakaan Kelurahan, Sarana dan prasarana Perpustakaan, Koleksi Bahan Pustaka dan daftar pemustaka
4.	Meningkatnya Pengelolaan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase Jumlah SKPD Yang Menerapkan Pengelolaan Arsip Secara Baku	%	Untuk memenuhi kriteria standar pengelolaan arsip unit kearsipan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung	<u>Jumlah SKPD yg telah Menerapkan Arsip Secara Baku</u>  Jumlah SKPD	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	Kriteria Standar pengelolaan arsip sekurang-kurangnya memiliki : Pengelola Arsip, sarana dan Prasarana Arsip, menerapkan manajemen kearsipan.
5.	Meningkatkan Aksesibilitas Retrieval Arsip	Retrieval arsip	Menit	Memberikan kepastian pelayanan yang maksimal kepada pengguna arsip	Waktu yang dibutuhkan dalam Retrieval Arsip	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	Proses retrieval arsip diukur sejak dimulainya pencarian, penemuan dan penyerahan arsip kepada pengguna arsip.
6.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Perpustakaan	Nilai	Untuk memberikan gambaran mengenai tingkat pelayanan perpustakaan yang sudah diberikan kepada masyarakat.	Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat  (Permenpan No. 16. Tahun 2004)  (Kepmenpan No. 25 Tahun 2004)	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sebagai bahan evaluasi Pelayanan perpustakaan dalam meningkatkan Standar Pelayanan kepada Masyarakat.
.		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Kearsipan	Nilai	Untuk memberikan gambaran mengenai tingkat pelayanan Kearsipan yang sudah diberikan kepada masyarakat.	Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat  (Permenpan No. 16. Tahun 2004)  (Kepmenpan No. 25 Tahun 2004)	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sebagai bahan evaluasi Pelayanan Kearsipan dalam meningkatkan Standar Pelayanan kepada Masyarakat.

## 12. Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.	Nilai Indeks kepuasan Masyarakat	Nilai	Karena Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut (RSKGM) sebagai salah satu instansi pemerintah yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan harus selalu dapat meningkatkan kualitas pelayanan sehingga outcome yang paling tepat adalah dengan mengukur indeks kepuasan masyarakat yang datang ke rumah sakit sehingga rumah sakit dapat mengevaluasi kualitas pelayanannya.	Total nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikali nilai penimbang, dikonversikan dengan nilai dasar 25.	Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur pelayanan</li> <li>2. Persyaratan pelayanan</li> <li>3. Kejelasan petugas pelayanan</li> <li>4. Kedisiplinan petugas</li> <li>5. Tanggungjawab petugas pelayanan</li> <li>6. Kemampuan petugas pelayanan</li> <li>7. Kecepatan pelayanan</li> <li>8. Keadilan mendapatkan pelayanan</li> <li>9. Kesopanan dan keramahan petugas</li> <li>10. Kewajaran biaya pelayanan</li> <li>11. Kepastian biaya pelayanan</li> <li>12. Kepastian jadwal pelayanan</li> <li>13. Kenyamanan lingkungan</li> <li>14. Keamanan pelayanan</li> </ol>
.		Cakupan pelayanan pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	%	Karena JKN adalah program nasional maka Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut (RSKGM) yang merupakan salah satu pelayanan kesehatan yang menerapkan sistem JKN dan RSKGM berperan sebagai Penyedia Pelayanan Kesehatan tingkat II, sehingga harus senantiasa dapat melayani pasien peserta JKN dan untuk mengetahui cakupan peserta JKN yang telah terlayani di rumah sakit	Jumlah peserta JKN yang dilayani dibagi dengan jumlah total pasien yang datang ke RSKGM dikali 100%	Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut	Peserta JKN adalah Pasien yang mempunyai/menggunakan kartu BPJS baik Penerima Bantuan Iuran (PBI) maupun non PBI
.		Keberhasilan pembuatan dental appliance	%	Sebagai Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut tentunya mempunyai Laboratorium tehnik gigi dimana diperlukan tenaga yang mempunyai keahlian untuk membuat bermacam macam dental appliance	jumlah pekerjaan yang dapat diselesaikan tanpa perbaikan/penyesuaian ulang dalam waktu 1 bulan dibagi jumlah pesanan yang diterima di laboratorium gigi dalam bulan tersebut (unit)	Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut	sebuah dental appliance dikatakan berhasil apabila hasil pekerjaan tersebut sesuai dengan pesanan yang diminta baik dalam hal fungsi , estetika dan nyaman pasien.

### 13. Rumah Sakit Umum Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN / KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	Rata- rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	1. Untuk mengetahui capaian kinerja pelayanan RSUD Kota Bandung terhadap masyarakat. 2. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan/ pendapat tentang pelayanan yang diberikan oleh RSUD Kota Bandung; 3. Berdasarkan Kepmenpan No.KEP/25/M.PAN/2/2004 Tentang pedoman umum penyusunan IKM Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, maka RSUD Kota Bandung melaksanakan indikator IKM.	Nilai rata-rata hasil survey kepuasan pelanggan di RSUD Kota Bandung	Rumah Sakit Umum Daerah	
.		Pencapaian Akreditasi Rumah Sakit	%	1. Untuk meningkatkan kepercayaan terhadap RSUD Kota Bandung oleh pelanggan. 2. Sebagai jaminan kepada pelanggan bahwa pelayanan yang diberikan sesuai standar rumah sakit. 3. Berdasarkan UU No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, maka RSUD Kota Bandung melakukan akreditasi.	Jumlah bab yang terpenuhi sesuai persyaratan kelulusan akreditasi tingkat madya ( 8 bab minimal masing 80 % dan 7 bab minimal masing- masing 20 % )	Rumah Sakit Umum Daerah	
.		Prosentase Pelayanan Terhadap Pasien Keluarga Miskin Yang Datang Ke Rumah Sakit	%	1. Memberikan pelayanan terhadap pasien keluarga miskin tanpa membedakan status. 2. Berdasarkan UU Republik Indonesia No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial dan PP Republik Indonesia No. 101 tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan. , maka RSUD Kota Bandung harus memberikan pelayanan Kesehatan terhadap keluarga miskin.	Jumlah pasien keluarga miskin yang dilayani rumah sakit dibagi jumlah seluruh pasien keluarga miskin yang datang ke rumah sakit dikali 100%	Rumah Sakit Umum Daerah	

### 14. Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN / KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan yang	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	KEPMENPAN Nomor : 25 Tahun 2004	Total dari nilai persepsi per unsur dibagi dengan total unsur yang terisi	Rumah Sakit Khusus	Hasil survey kepuasan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
	terstandarisasi kelas dunia			tentang Indeks Kepuasan Masyarakat	dikali nilai penimbang	Ibu dan Anak	pelanggan
.		Kejadian kematian ibu karena perdarahan kurang dari atau sama dengan 0.1%	%	Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	Standar kejadian kematian ibu bersalin karena perdarahan $\leq 0,1\%$ dibagi dengan jumlah kejadian kematian karena perdarahan per jumlah total kasus persalinan dengan perdarahan dikali 100%	Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak	Laporan dan pencatatan dari Medical Record
.		Kejadian kematian ibu karena preeklamsi kurang dari atau sama dengan 0.3%	%	Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	Standar kejadian kematian ibu bersalin karena preeklamsi $\leq 0,3\%$ dibagi dengan jumlah kejadian kematian karena preeklamsi per jumlah total kasus persalinan dengan preeklamsi dikali 100%	Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak	Laporan dan pencatatan dari Medical Record
.		Kejadian kematian ibu karena sepsis kurang dari atau sama dengan 0.2%	%	Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	Standar persalinan melalui Seksio Cesaria yang direncanakan $\leq 0,2\%$ dibagi jumlah total Seksio Cesaria per jumlah total persalinan dikali 100%	Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak	Laporan dan pencatatan dari Medical Record
.		Cakupan pertolongan persalinan melalui Seksio Cesaria yang direncanakan kurang dari atau sama dengan 10%	%	Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	Standar persalinan melalui Seksio Cesaria yang direncanakan $\leq 10\%$ dibagi jumlah total Seksio Cesaria per jumlah total persalinan dikali 100%	Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak	Laporan dan pencatatan dari medical record
.		Cakupan kemampuan menangani BBLR 1000 Gram -2500 Gram	%	Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	Jumlah BBLR (1000 gr- 2500 gr) yang berhasil ditangani dibagi dengan jumlah total BBLR (1000 gr - 2500 gr) yang ditangani dikali 100%	Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak	Laporan dan pecatatan dari Medical Record
.		Kematian Pasien Lebih dari 48 Jam di Rawat Inap kurang dari atau sama dengan 2.5/1000	%	Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	Standar kejadian kematian pasien $>48$ jam 2,5/1000 dibagi dengan jumlah kejadian kematian $>48$ jam per jumlah total rawat inap dikali	Rumah Sakit Khusus Ibu dan	Laporan dan pencatatan dari Medical Record

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
					100%	Anak	
.		Cakupan Pelayanan Pasien Keluarga miskin	%	Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	Jumlah pasien keluarga miskin yang dilayani dibagi dengan jumlah total pasien keluarga miskin yang datang ke rumah sakit dikali 100%	Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak	Laporan dan pencatatan dari Medical Record
.		Cakupan Pelayanan pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%	Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	Jumlah pasien rawat inap JKN yang dilayani dibagi dengan jumlah total pasien rawat inap yang datang ke rumah sakit dikali 100%	Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak	Laporan dan pencatatan dari Medical Record

## 15. Dinas Pencegahan & Penanggulangan Kebakaran

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya pencegahan bahaya kebakaran dan bencana pada masyarakat	Persentase kelurahan siaga kebakaran dan bencana lainnya	%	Agar target yang tertuang dalam RPJMD dapat terpenuhi.	Jumlah Kelurahan Siaga <u>Kebakaran dan Bencana lainnya</u> : Jumlah Kelurahan  x 100%	Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan.</li> <li>Pengaturan manajemen proteksi kebakaran di perkotaan dimaksudkan untuk mewujudkan bangunan gedung, lingkungan, dan kota yang aman terhadap bahaya kebakaran melalui penerapan manajemen proteksi bahaya kebakaran yang efektif dan efisien. Pengaturan manajemen proteksi kebakaran di perkotaan dimaksud bertujuan untuk mewujudkan kesiapan, kesigapan, dan keberdayaan masyarakat, pengelola bangunan gedung, serta dinas terkait dalam mencegah, dan menanggulangi bahaya kebakaran.</li> <li>Mendorong peran serta masyarakat/Satuan Relawan Kebakaran (SATWANKAR) untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran dini serta bencana lainnya.</li> </ol>
2.	Mewujudkan pengelolaan kebakaran dan bencana lainnya yang handal, dini, komprehensif	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	%	Pemenuhan target dalam SPM dan RPJMD	<u>Jangkauan Luas WMK</u> Luas Wilayah Kota Bandung	Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota</li> <li>Kajian tentang Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran</li> </ol>

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
					x 100%		(RISPK)
3.	Mewujudkan respon waktu tanggap darurat kebakaran dan bencana lainnya kurang dari 15 menit	Tingkat waktu tanggap (response time rate)	menit	Pemenuhan target dalam SPM dan RPJMD	Menggunakan alat ukur waktu tempuh/stopwatch (waktu dihitung mulai dari terima berita, dalam perjalanan dan tiba di lokasi)	Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan.</li> <li>Daerah layanan pemadaman kebakaran dalam setiap WMK tidak melebihi jarak perjalanan 7,5 km ( travel distance ) dan dipenuhinya waktu tanggap kurang dari 15 menit.</li> <li>Untuk jenis layanan medis darurat dan Bahan Beracun dan Berbahaya (B3), pemenuhan waktu tanggap disesuaikan dengan kebutuhan.</li> <li>Kajian tentang Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK)</li> </ol>
4.	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	Agar target yang tertuang dalam RPJMD dapat terpenuhi	Survei dan Wawancara	Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Survei dan Wawancara dilakukan kepada warga masyarakat yang tidak terkena dampak dari meluasnya ancaman bahaya kebakaran dan bencana lainnya (mengurangi eskalasi kebakaran), serta jenis layanan lainnya yang diberikan oleh DPPK
5.	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Nilai evaluasi AKIP	Angka	Pemenuhan target dalam RENSTRA dan RPJMD	Penilaian dan evaluasi dilakukan oleh Inspektorat/BPK	Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	
.		Prosentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	%	Pemenuhan target dalam RENSTRA dan RPJMD	Penilaian dan evaluasi dilakukan oleh Inspektorat/BPK	Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	

## 16. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan	Hasil Survei	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Survei dilakukan dengan pengisian kuisioner oleh masyarakat yang membuat

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							<p>dokumen kependudukan.</p> <p>Kuisisioner berisi unsur-unsur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003.</p> <p>Penghitungan hasil survei dilakukan dengan metode yang sudah ditetapkan.</p>
		Rata-rata waktu pengurusan KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Akta Kematian	Hari Kerja	Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan	Jumlah waktu (hari) penerbitan KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian pada tahun X dibagi jumlah KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian yang di terbitkan pada tahun X	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<p>Waktu pengurusan penerbitan KTP, KK, Akta Kelahiran dan Akta Kematian masing-masing adalah 8 hari</p> <p>Penghitungan:</p> <p>Hitung waktu kepengurusan untuk masing-masing layanan (KTP, KK, Akta Kelahiran dan AKta Kematian) Jumlahkan hasil hitungan dari masing-masing waktu kepengurusan Bagi 4 hasil penjumlahan tadi.</p> <p>Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan</p>
		Persentase penyelesaian penerbitan KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Akta Kematian yang dapat diselesaikan tepat waktu	%	Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan	Jumlah KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian yang diterbitkan tepat waktu pada tahun X dibagi KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian yang didaftarkan pada tahun X dikalikan 100 persen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<p>Penghitungan:</p> <p>Hitung persentase penyelesaian untuk masing-masing layanan (KTP, KK, Akta Kelahiran dan AKta Kematian) yang dapat diselesaikan tepat waktu Jumlahkan hasil hitungan persentase penyelesaian untuk masing-masing layanan yang dapat diselesaikan tepat waktu Bagi 4 hasil penjumlahan tadi.</p> <p>Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan</p>
2.	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	%	SPM	Jumlah KK yang diterbitkan dibagi jumlah kepala keluarga dikalikan 100 persen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<p>Pembilang: Jumlah KK yang di terbitkan</p> <p>Penyebut: Jumlah kepala keluarga (yang tercatat di kewilayahan)</p> <p>Sumber Data: Dinas Kependudukan dan</p>

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
.		Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	%	SPM	Jumlah KTP yang diterbitkan dibagi jumlah penduduk wajib KTP dikalikan 100 persen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<p>Pencatatan Sipil, Kecamatan dan Kelurahan</p> <p>Pembilang: Jumlah KTP yang di terbitkan</p> <p>Penyebut: Jumlah penduduk wajib KTP (penduduk berusia 17 tahun ke atas dan atau telah menikah)</p> <p>Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan dan Kelurahan</p>
.		Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	%	SPM	Jumlah penduduk yang lahir dan memperoleh kutipan akta kelahiran yang diterbitkan pada tahun X dibagi jumlah kelahiran yang terjadi pada tahun X dikalikan 100 persen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<p>Pembilang: Jumlah penduduk yang lahir dan memperoleh kutipan akta kelahiran yang diterbitkan pada tahun X (pada tahun bersangkutan)</p> <p>Penyebut: Jumlah kelahiran yang terjadi pada tahun X (pada tahun bersangkutan)</p> <p>Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, Kecamatan dan Kelurahan</p>
.		Cakupan Penerbitan Akta Kematian	%	SPM	Jumlah penduduk yang meninggal dan memperoleh kutipan akta kematian yang diterbitkan pada tahun X dibagi jumlah kematian yang terjadi pada tahun X dikalikan 100 persen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<p>Pembilang: Jumlah penduduk yang meninggal dan memperoleh kutipan akta kematian yang diterbitkan pada tahun X (pada tahun bersangkutan)</p> <p>Penyebut: Jumlah kematian yang terjadi pada tahun X (pada tahun bersangkutan)</p> <p>Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemakaman dan Pertamanan, Dinas Kesehatan, Kecamatan dan Kelurahan</p>
3.	Meningkatnya Akurasi Database Kependudukan	Validitas Database Kependudukan	%	Meningkatkan validitas database kependudukan	Data kependudukan di kewilayahan dibagi data kependudukan Disdukcapil dikalikan 100 persen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<p>Untuk mengukur keakuratan data yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil dengan data riil di kewilayahan guna mewujudkan database kependudukan yang berkualitas</p> <p>Pembilang: Data kependudukan di kewilayahan</p> <p>Penyebut: Data kependudukan Disdukcapil</p>

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan dan Kelurahan

## 17. Dinas Tata Ruang & Ciptakarya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	terwujudnya tertib perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota yang konsisten	prosentase pembangunan gedung yang memiliki IMB	%	Sebagai alat untuk mengukur jumlah pengaduan, permasalahan dan pelanggaran yang tidak memiliki IMB  Normatif ..	jumlah gedung yang memiliki IMB dibagi jumlah yang tidak memiliki IMB	Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya	kriteria bangunan yang wajib memiliki IMB atau penjelasan bangunan harus ber IMB
.		prosentase penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang	%	Sebagai alat untuk mengukur jumlah pengaduan, permasalahan dan pelanggaran yang tidak memiliki IMB	jumlah pelanggaran/ pengaduan yang dapat diselesaikan dibagi jumlah seluruh pengaduan/ pelanggaran pemanfaatan tata ruang	Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya	Dukungan stakeholder dalam menjaga secara bersama-sama dalam pemanfaatan tata ruang
2.	meningkatnya ketersediaan dan kualitas perumahan	prosentase berkurangnya luas kawasan permukiman kumuh	%	Setiap tahun harus berkurang luas kawasan kumuh di Kota Bandung	luas kawasan permukiman kumuh dibagi luas permukiman	Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya	Hitungan penurunan luasa kawasan kumuh 1%= 16,792 Ha
.		prosentase daya tampung rumah susun bagi Masyarakat Berpenghasilan rendah (MBR)	%	Masih terdapatnya jumlah penduduk yang belum memiliki rumah terutama masyarakat berpenghasilan rendah	rumah susun dibagi pemohon	Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya	Dibuatnyarumah susun dan apartemen rakyat
.		prosentase rumah layak huni	%	Masih terdapatnya rumah yang tidak layak huni tersebar di Kota Bandung		Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya	Terdapatnya perubahan dari punya rumah tidak layak huni menjadi layak
3.	terwujudnya infrastruktur sanitasi dan air bersih yang berkualitas dan merata	Jumlah Kepala Keluarga pada kawasan permukiman yang mempunyai sanitasi dan air bersih	KK	Belum tersebar secara merata yang mempunyai sanitasi dan air bersih	jumlah kepala keluarga masyarakat terlayani air bersih dibagi jumlah kepala keluarga se Kota Bandung	Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya	Dapat mengukur/ mengetahui jumlah kawasan yang mempunyai sanitasi dan air bersih di Kota Bandung
4.	meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan bidang ke tata ruangan	Angka	Untuk mendukung capaian nilai A SAKIP Kota Bandung		Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya	Untuk mendukung capaian nilai A SAKIP Kota Bandung
.		Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Angka	.		Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya	
.		Persentase temuan BPK/ Inspektorat ditindaklanjuti	%	.		Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya	

## 18. Dinas Pelayanan Pajak

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Tercapainya Target Penerimaan Pajak Daerah	#Jumlah penerimaan pajak daerah :#1.Pajak Hotel	Rupiah	Kenaikan per tahun RPJPD dan RPJMD berdasarkan Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta Perda No. 20 tahun 2011 tentang Pajak Daerah	Penerimaan Pajak Daerah tahun berjalan	Dinas Pelayanan Pajak	Kenaikan target sebesar 15 % pertahun sesuai ketetapan RPJMD dan LPE Kota Bandung dan bukan berdasarkan data potensi penerimaan pajak daerah
.		#Jumlah penerimaan pajak daerah :#2.Pajak Restoran	Rupiah	Kenaikan per tahun RPJPD dan RPJMD berdasarkan Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta Perda No. 20 tahun 2011 tentang Pajak Daerah	Penerimaan Pajak Daerah tahun berjalan	Dinas Pelayanan Pajak	Kenaikan target sebesar 15 % pertahun sesuai ketetapan RPJMD dan LPE Kota Bandung dan bukan berdasarkan data potensi penerimaan pajak daerah
.		#Jumlah penerimaan pajak daerah :#3.Pajak Hiburan	Rupiah	Kenaikan per tahun RPJPD dan RPJMD berdasarkan Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta Perda No. 20 tahun 2011 tentang Pajak Daerah	Penerimaan Pajak Daerah tahun berjalan	Dinas Pelayanan Pajak	Kenaikan target sebesar 15 % pertahun sesuai ketetapan RPJMD dan LPE Kota Bandung dan bukan berdasarkan data potensi penerimaan pajak daerah
.		#Jumlah penerimaan pajak daerah :#4.Pajak Parkir	Rupiah	Kenaikan per tahun RPJPD dan RPJMD berdasarkan Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta Perda No. 20 tahun 2011 tentang Pajak Daerah	Penerimaan Pajak Daerah tahun berjalan	Dinas Pelayanan Pajak	Kenaikan target sebesar 15 % pertahun sesuai ketetapan RPJMD dan LPE Kota Bandung dan bukan berdasarkan data potensi penerimaan pajak daerah
.		#Jumlah penerimaan pajak daerah :#5.Pajak BPHTB	Rupiah	Kenaikan per tahun RPJPD dan RPJMD berdasarkan Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta Perda No. 20 tahun 2011 tentang Pajak Daerah	Penerimaan Pajak Daerah tahun berjalan	Dinas Pelayanan Pajak	Kenaikan target sebesar 15 % pertahun sesuai ketetapan RPJMD dan LPE Kota Bandung dan bukan berdasarkan data potensi penerimaan pajak daerah
.		#Jumlah penerimaan pajak daerah :#6.Pajak Penerangan Jalan	Rupiah	Kenaikan per tahun RPJPD dan RPJMD berdasarkan Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta Perda No. 20 tahun 2011 tentang Pajak Daerah	Penerimaan Pajak Daerah tahun berjalan	Dinas Pelayanan Pajak	Kenaikan target sebesar 15 % pertahun sesuai ketetapan RPJMD dan LPE Kota Bandung dan bukan berdasarkan data potensi penerimaan pajak daerah
.		#Jumlah penerimaan pajak daerah :#7.Pajak	Rupiah	Kenaikan per tahun RPJPD dan RPJMD berdasarkan Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta Perda No. 20 tahun 2011 tentang Pajak Daerah	Penerimaan Pajak Daerah tahun berjalan	Dinas Pelayanan Pajak	Kenaikan target sebesar 15 % pertahun sesuai ketetapan RPJMD dan LPE Kota Bandung dan bukan berdasarkan data potensi penerimaan pajak daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
		Reklame					
.		#Jumlah penerimaan pajak daerah :#8.Pajak Air Tanah	Rupiah	Kenaikan per tahun RPJPD dan RPJMD berdasarkan Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta Perda No. 20 tahun 2011 tentang Pajak Daerah	Penerimaan Pajak Daerah tahun berjalan	Dinas Pelayanan Pajak	Kenaikan target sebesar 15 % pertahun sesuai ketetapan RPJMD dan LPE Kota Bandung dan bukan berdasarkan data potensi penerimaan pajak daerah
.		#Jumlah penerimaan pajak daerah :#9.Pajak PBB	Rupiah	Kenaikan per tahun RPJPD dan RPJMD berdasarkan Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta Perda No. 20 tahun 2011 tentang Pajak Daerah	Penerimaan Pajak Daerah tahun berjalan	Dinas Pelayanan Pajak	Kenaikan target sebesar 15 % pertahun sesuai ketetapan RPJMD dan LPE Kota Bandung dan bukan berdasarkan data potensi penerimaan pajak daerah
2.	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik	IKM bidang pelayanan pajak daerah	nilai	Berdasarkan KEP/25/M.PAN/2/2014 tentang pedoman umum penyusunan IKM unit pelayanan instansi Pemerintah dan Surat Edaran Walikota Bandung No. 027/SE.021- Bag. Orpad tentang pelaksanaan SKPD/unit kerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik dilingkungan Pemerintah Kota Bandung	Nilai hasil survey yang membayar pajak	Dinas Pelayanan Pajak	Untuk meningkatkan kualitas pelayanan maka perlu dievaluasi berdasarkan Kemenpan sehingga terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima

## 19. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Optimalnya waktu yang diperlukan dan meningkatnya kualitas Penyusunan RAPBD sesuai ketentuan yang berlaku	Lamanya waktu penyusunan RAPBD	Hari	<p>Sesuai amanat Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa sesuai Pasal 87 ayat (5), bahwa penetapan Nota Kesepakatan KUA/PPA antara Eksekutif dan Legislatif ditandatangani bersama paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.</p> <p>Sesuai Pasal 104 ayat (1), Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk</p>	Tanggal penyampaian RAPBD - Tanggal penandatanganan Nota Kesepakatan KUA / PPA	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nota Kesepakatan KUA/PPA antara Eksekutif dan Legislatif yang telah ditandatangani</li> <li>2. Nota Keuangan Raperda APBD</li> </ol> <p>Kecepatan waktu penyampaian penyusunan RAPBD dari mulai disepakatinya KUA/PPA sampai dengan penyampaian Raperda APBD menjadi indikator utama untuk percepatan pembangunan di Kota Bandung.</p> <p>Penghitungan dilakukan dengan menghitung waktu (hari kalender) dimulai sejak tanggal Nota</p>

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN / KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
				mendapatkan persetujuan bersama.			Kesepakatan KUA/PPA antara Eksekutif dan Legislatif disepakati sampai dengan tanggal penyampaian Raperda APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD Kota Bandung.
		Prosentase Realisasi terhadap Anggaran Pendapatan yang telah ditetapkan	%	Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, anggaran pendapatan yang ditetapkan menjadi target pendapatan yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kota	$(\text{Realisasi Pendapatan} / \text{Anggaran Pendapatan}) \times 100\%$	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1. Anggaran Pendapatan 2. Realisasi Pendapatan  Penghitungan dilakukan dengan membandingkan anggaran pendapatan dengan realisasi pendapatan
		Prosentase Realisasi terhadap Anggaran Belanja yang telah ditetapkan	%	Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, anggaran belanja yang ditetapkan adalah anggaran tertinggi untuk Pemerintah Kota dalam melakukan pembelanjaan	$(\text{Realisasi Belanja} / \text{Anggaran Belanja}) \times 100\%$	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1. Anggaran Belanja 2. Realisasi Belanja  Penghitungan dilakukan dengan membandingkan anggaran belanja dengan realisasi belanja
2.	Meningkatnya layanan penatausahaan keuangan sesuai peraturan perundangan	Prosentase waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah sesuai ketentuan secara tepat waktu	%	Sesuai amanat pemendagri 13 /2006 ttg pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 217, maka Penerbitan SP2D paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM	$(\text{Jumlah SP2D yang terbit tepat waktu} / \text{Seluruh jumlah SP2D yang diterbitkan}) \times 100\%$	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Rekap SP2D berdasarkan tanggal masuknya SPM yang lengkap dan benar serta tanggal terbitnya SP2D  Prosentase Jumlah SP2D yang terbit sejak diterimanya SPM yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dibagi seluruh penerbitan SP2D
3.	Meningkatnya penatausahaan aset daerah sesuai peraturan perundangan	Prosentase kesesuaian data rincian Total BMD dengan aktiva tetap di Neraca Pemerintah Kota	%	Sesuai amanat pemendagri 13 /2006 ttg pedoman pengelolaan keuangan daerah, maka jumlah neraca SKPD termasuk rincian Total BMD harus sesuai	$(\text{Jumlah Rincian Total BMD di Simda Barang} / \text{Data Aset pada Neraca Pemerintah Kota di Simda Keuangan}) \times 100\%$	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Neraca Rincian Total BMD
		Prosentase tanah milik Pemerintah Kota Bandung bersertifikat	%	Dalam rangka pengamanan aset, maka seluruh pengadaan tanah dan aset tanah yang dimiliki Pemerintah Kota Bandung harus disertifikatkan	$(\text{Luas Tanah milik Pemerintah Kota Bersertifikat} / \text{Seluruh Luas})$	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Sertifikat Tanah milik Pemerintah Kota

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN / KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
					Tanah yang dimiliki dikuasai Pemerintah Kota) X 100 %		
4.	Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Kinerja	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	Opini	Sesuai amanat pemendagri 13 /2006 ttg pengelolaan keuangan daerah maka DPKAD harus melakukan tertib administrasi pengelolaan keuangan	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandung menjadi kategori / nilai yang diperoleh	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK

## 20. Dinas Sosial

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN / KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya partisipasi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Prosentase Tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS	%	Partisipasi TKSK sangag diperlukan guna membantu penanggulangan PMKS	Jumlah TKSK yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS  X 100%  Jumlah Seluruhnya TKSK yang ada	Dinas Sosial	
2.	Meningkatnya kemandirian hidup penyandang cacat	Prosentase penyandang cacat yang mampu hidup mandiri	%	Penyandang cacat merupakan salah satu jenis PMKS yang perlu mendapatkan perhatian	Jumlah penyandang cacat yang mampu mandiri  X 100%  Jumlah seluruh penyandang cacat yang ada	Dinas Sosial	
3.	Meningkatnya perubahan perilaku PMKS jalanan (WTS,	Prosentase gelandangan atau pengemis yang mengalami	%	Keberadaan gelandangan dan pengemis mengganggu	Jumlah gelandangan atau pengemis yang mengalami perubahan perilaku	Dinas Sosial	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN / KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
	gepeng dan anak jalanan)	perubahan perilaku		ketertiban lingkungan	$\frac{\text{Jumlah total seluruh gelandangan atau pengemis yang ada di jalanan}}{\text{Jumlah total seluruh gelandangan atau pengemis yang ada di jalanan}} \times 100\%$		
.		Prosentase wanita tuna susila yang mengalami perubahan perilaku	%	Keberadaan WTS mengganggu ketertiban lingkungan	$\frac{\text{WTS yang mengalami perubahan perilaku}}{\text{Jumlah total WTS yang ada}} \times 100\%$	Dinas Sosial	
.		Prosentase anak jalanan yang mengalami perubahan perilaku	%	Anak jalanan merupakan salah satu jenis PMKS yang harus mendapatkan perhatian	$\frac{\text{anak jalanan yang mengalami perubahan perilaku}}{\text{Jumlah total anak jalanan yang ada}} \times 100\%$	Dinas Sosial	
4.	Meningkatnya kualitas hidup keluarga miskin dan perempuan rawan sosial ekonomi	Prosentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya	%	Keluarga miskin merupakan salah satu jenis PMKS yang perlu mendapatkan perhatian	$\frac{\text{jumlah Keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya}}{\text{Jumlah total keluarga miskin}} \times 100\%$	Dinas Sosial	
.		Prosentase Perempuan rawan sosial ekonomi (PRSE) yang meningkat kualitas hidupnya	%	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi merupakan salah satu jenis PMKS yang perlu mendapatkan perhatian	$\frac{\text{jumlah PRSE yang mengalami perubahan perilaku}}{\text{Jumlah total PRSE}} \times 100\%$	Dinas Sosial	
5.	Meningkatnya kondisi pulih psikologis korban trafficking dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)	Prosentase korban KDRT dan trafficking yang pulih kondisi psikologisnya	%	Korban KDRT dan trafficking merupakan salah satu jenis PMKS yang perlu mendapatkan perhatian	$\frac{\text{jumlah korban trafficking dan KDRT yang pulih kondisi psikologisnya}}{\text{Jumlah korban trafficking dan KDRT yang mendapatkan pelayanan}} \times 100\%$	Dinas Sosial	
6.	Meningkatnya perubahan perilaku anak yang	Jumlah anak yang berhadapan dengan hukum	Orang	Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan salah	$\frac{\text{jumlah anak yang mengalami perubahan perilaku}}{\text{Jumlah total anak yang berhadapan dengan hukum}} \times 100\%$	Dinas Sosial	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN / KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
	berhadapan dengan hukum	yang mengalami perubahan perilaku		satu jenis PMKS yang perlu mendapatkan perhatian	100% Jumlah anak yang mendapatkan pelayanan		
7.	Meningkatnya ketepatan waktu penanganan korban bencana alam/sosial	Prosentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang tersampaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari	%	Korban bencana merupakan salah satu jenis PMKS yang perlu mendapatkan perhatian	jumlah korban bencana yang menerima bantuan kurang dari 3 hari 100% Jumlah korban bencana yang mendapatkan bantuan	Dinas Sosial	
8.	Meningkatnya perlindungan lanjut usia hak hidup dasar lanjut usia dan anak terlantar di luar dan dalam panti	Prosentase lanjut usia terlantar yang terlindungi hak hidup dasarnya	%	Lansia terlantar merupakan salah satu jenis PMKS yang perlu mendapatkan perhatian	jumlah lansia terlantar yang ditangani 100% Jumlah lansia terlantar yang seharusnya ditangani	Dinas Sosial	
.		Prosentase anak terlantar yang terlindungi hak hidup dasarnya	%	Anak terlantar merupakan salah satu jenis PMKS yang perlu mendapatkan perhatian	jumlah anak terlantar yang ditangani 100% Jumlah anak terlantar yang seharusnya ditangani	Dinas Sosial	
9.	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat	%	Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan prioritas daerah	jumlah masyarakat yang merasa puas atas pelayanan 100% Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan	Dinas Sosial	

## 21. Dinas Pendidikan

## 22. Dinas Kesehatan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN / KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar, kegawatdaruratan dan rujukan khususnya masyarakat miskin	Persentase Pemenuhan pencapaian SPM penyakit menular yang ditangani	%	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota	Persentase nilai realisasi dari seluruh indikator penyakit menular setelah dihitung dari nilai capaian dibagi target x 100 persen dibagi jumlah indikator	Dinas Kesehatan	<p>1. Cakupan Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate per 100,000 penduduk &lt; 15 th</p> <p>2. Cakupan Penemuan Penderita Pneumonia Balita</p> <p>3. Cakupan Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif</p> <p>4. Cakupan Penderita DBD yang ditangani</p> <p>5. Cakupan Penemuan Penderita Diare</p> <p>6. Penderita penyakit menular lainnya yang ditangani</p>
.		Persentase Pemenuhan pencapaian pelayanan kesehatan lainnya	%	Kebutuhan akan pelayanan kesehatan terus berkembang dan pelayanan kesehatan lainnya merupakan indikator yang digunakan dalam pelayanan kesehatan dasar lainnya diluar SPM dan MDGs.	Persentase nilai realisasi dari seluruh indikator pelayanan kesehatan lainnya setelah dihitung dari nilai capaian dibagi target x 100 persen dibagi jumlah indikator	Dinas Kesehatan	<p>Persentase balita ditimbang berat badan D/S</p> <p>Cakupan KK Rawan yang di bina</p> <p>Cakupan Pelayanan kesehatan dasar, swasta sesuai standar</p> <p>Jumlah puskesmas yang melaksanakan pembinaan anak berkebutuhan khusus</p> <p>Jumlah puskesmas yang dibina dalam pelayanan kesehatan matra</p> <p>Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan indera</p> <p>Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa dasar</p> <p>jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan kerja</p> <p>Jumlah puskesmas yang melaksanakan pembinaan sarana kesehatan tradisional</p> <p>Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan gigi mulut dasar</p> <p>Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan olah raga dasar</p> <p>Persentase puskesmas yang melaksanakan pemeriksaan faktor resiko PTM</p> <p>Jumlah orang yang berumur 15 tahun atau &gt; yang menerima konseling dan testing HIV</p>

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN / KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							Jumlah kecamatan yang melaksanakan advokasi dan sosialisasi pencegahan dan penularan HIV Industri rumah Tangga yang memiliki sertifikat P-IRT Sarana pelayanan ke farmasian yang dibina
.		Persentase Fasilitas kesehatan yang memiliki sertifikat ijin	%	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat	Persentase nilai realisasi dari seluruh indikator fasilitas kesehatan yang memenuhi persyaratan mendapatkan sertifikat izin setelah dihitung dari nilai capaian dibagi target x 100 persen dibagi jumlah indikator	Dinas Kesehatan	Tenaga kesehatan yang memiliki sertifikat ijin Fasilitas kesehatan yang memiliki sertifikat ijin Puskesmas terakreditasi
.		Persentase Pasien miskin yang di rujuk dan dilayani oleh PPK II	%	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat	Persentase nilai realisasi dari seluruh indikator pasien miskin yang mendapat pelayanan di PPK II setelah dihitung dari nilai capaian dibagi target x 100 persen dibagi jumlah indikator	Dinas Kesehatan	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus ditangani sarana kesehatan (RS) di Kab / Kota
.		Persentase Kecamatan dengan pemenuhan puskesmas dibandingkan dengan rasio jumlah puskesmas dan jumlah penduduk	%	Untuk meningkatkan pemerataan jangkauan pelayanan kesehatan kepada masyarakat maka di setiap kecamatan harus memiliki puskesmas sesuai standar (ratio puskesmas dengan jumlah penduduk)	Kecamatan yang memiliki puskesmas sesuai standar dibandingkan dengan jumlah kecamatan dalam periode tertentu x 100%	Dinas Kesehatan	Jumlah Puskesmas
.		Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	Untuk memenuhi UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Daerah Kota Bandung No.16 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik	Persentase total dari nilai persepsi per unsur dibagi dengan total unsur yang terisi dikalikan nilai penimbang x 100	Dinas Kesehatan	Hasil Survei Kepuasan Pelanggan di Pelayanan Kesehatan sesuai dengan UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Daerah Kota Bandung No.16 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
					%		
.		Persentase Pemenuhan pencapaian SPM pelayanan kesehatan dasar pada bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, ibu dan lansia	%	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota	Persentase nilai realisasi dari seluruh indikator pelayanan kesehatan dasar pada bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, ibu dan lansia setelah dihitung dari nilai capaian dibagi jumlah indikator	Dinas Kesehatan	<p>1.Indikator Bayi (Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani; Cakupan Kunjungan Bayi (umur 29 hr- 11 bulan); Cakupan Desa/Kelurahan UCI)</p> <p>2.Indikator Balita (Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan; Cakupan pelayanan anak balita; Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin)</p> <p>3. Indikator Anak usia sekolah (Cakupan penjangingan kesehatan siswa kelas 1 SD dan sederajat)</p> <p>4. Indikator Remaja (Cakupan Pelayanan penjangingan kesehatan siswa SMP/SMA dan setingkat)</p> <p>5. Indikator Ibu (Cakupan peserta KB aktif; Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan KB sesuai standar; Cakupan ibu hamil K4; Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani; Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan; Puskesmas rawat inap yang mampu melaksanakan pelayanan obstetrik neonatal emergensi dasar (PONED); Cakupan Pelayanan Nifas) dan</p>
2.	Meningkatnya kesehatan masyarakat	Persentase Balita gizi buruk	%	Permenkes No.23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi	Persentase dari jumlah balita gizi buruk dibagi dengan jumlah balita seluruhnya x 100 %	Dinas Kesehatan	Hasil penghitungan menggunakan kriteria pengukuran status gizi balita
.		Persentase Bumil KEK	%	UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan	Jumlah Bumil KEK tanpa penyakit penyerta yang mendapat PMT dibagi jumlah Bumil Resti di suatu wilayah x 100 % dalam kurun waktu 1 tahun	Dinas Kesehatan	Laporan dari masing-masing pengelola program dan kegiatan
.		Angka kematian ibu	per 100000 Kelahiran Hidup	UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan	Jumlah kematian ibu karena kehamilan, persalinan, masa nifas dalam suatu wilayah dan	Dinas Kesehatan	Cakupan penurunan jumlah kematian ibu karena kehamilan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN / KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
					periode tertentu dibandingkan dengan jumlah lahir hidup dalam waktu dan periode yang sama x 100.000 KH		
		Angka kematian bayi	per 1000 kelahiran hidup	UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan	Jumlah kematian bayi di bawah usia 1 tahun dalam suatu wilayah dan periode tertentu dibandingkan dengan jumlah lahir hidup dalam waktu dan periode yang sama x 1000 KH	Dinas Kesehatan	Cakupan penurunan jumlah kematian bayi
3.	Menurunnya Kejadian penyakit menular di masyarakat	Persentase Penurunan penderitanya penyakit Demam Berdarah dengue (DBD)	%	Depkes RI. Petunjuk Teknis Pengamatan Penyakit Demam Berdarah Dengue. Dit. Jend P2M dan PI Jakarta 1999	Persentase dari perhitungan insidens rate yaitu selisih antara jumlah kasus penyakit menular DBD tahun sebelumnya dikurangi dengan kasus penyakit DBD pada tahun perhitungan dibandingkan dengan jumlah kasus penyakit menular DBD pada tahun sebelumnya x 100 %	Dinas Kesehatan	Penghitungan penurunan insidens rate (IR) penyakit DBD
		Persentase Penurunan penderitanya penyakit menular ISPA	%	Ditjen PP&PL Departemen Kesehatan, Pedoman Penanggulangan Episenter Pandemi Influenza, Jakarta, 2008	Kasus pneumonia pada balita dalam satu wilayah yang terjangkau oleh pelayanan kesehatan dibandingkan dengan jumlah balita dalam kurun waktu tertentu x 100 %	Dinas Kesehatan	Penghitungan penurunan kasus ISPA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN / KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
.		Persentase Penurunan penderita penyakit menular Diare	%	Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1216 Tahun 2001 tentang Pedoman Pemberantasan Penyakit Diare	Kasus diare dalam suatu wilayah yang dapat dijangkau oleh pelayanan kesehatan dibandingkan dengan jumlah penduduk pada kurun waktu tertentu x 100 %	Dinas Kesehatan	Penghitungan penurunan kasus Diare
.		Persentase Penanggulangan Kejadian Luar biasa < dari 24 jam	%	UU No.4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Permenkes No.1501 Tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Penanggulangannya.	Jumlah kejadian luar biasa yang ditangani kurang dari 24 jam dibandingkan dengan jumlah kejadian luar biasa x 100 %	Dinas Kesehatan	Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan < 24 Jam
4.	Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam pemeliharaan kesehatan	Persentase RW Siaga aktif	%	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota	Persentase dari jumlah RW Siaga aktif yang dibandingkan dengan jumlah RW Siaga yang dibentuk x 100 %	Dinas Kesehatan	Jumlah RW Siaga Aktif
5.	Meningkatnya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat dan penggunaan air minum	Persentase Kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	%	Permenkes No.416 Tahun 1990 tentang Persyaratan Kualitas Air Bersih. Kepmenkes No.6 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	JPersentase dari jumlah kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dibandingkan dengan jumlah kelurahan yang ada di Kota Bandung dalam periode tertentu x 100 %	Dinas Kesehatan	Jumlah Kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
.		Persentase Rumah tangga menggunakan air minum yang memenuhi syarat	%	Permenkes No.492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Air Minum. Permenkes No.736 Tahun 2010 tentang Tatalaksana Persyaratan Air Minum.	Persentase dari jumlah sarana air minum pada rumah tangga yang memenuhi syarat dibandingkan dengan seluruh sarana air minum	Dinas Kesehatan	Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN / KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
					pada rumah tangga yang diuji pada wilayah dan periode tertentu x 100 %		

### 23. Dinas Tenaga Kerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN / KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	merupakan target kinerja RPJPD 2005-2025 dan target kinerja RPJMD 2013-2018.  TPT adalah suatu nilai persentase perbandingan jumlah Penganggur dengan jumlah Angkatan Kerja, penurunan persentase dapat diindikasikan penyerapan tenaga kerja meningkat, tetapi jika persentase meningkat kemungkinan faktor yang mempengaruhinya adalah terjadinya peningkatan jumlah Angkatan Kerja sebagai akibat dari meningkatnya laju pertumbuhan penduduk, serta meningkatnya angka lulusan sekolah. Kemungkinan juga adanya peningkatan jumlah penduduk sementara yang tidak bekerja, berkeinginan untuk bekerja atau sedang mencari pekerjaan, sehingga menambah jumlah pengangguran.	Jumlah Penganggur Dibanding Dengan Jumlah Angkatan Kerja	Dinas Tenaga Kerja	1. Berdasarkan Target RPJPD 2005-2025  2. Berdasarkan Target Sasaran RPJMD 2013-2018
2.	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Prosentase Tenaga Kerja Yang Kompeten	%	Hasil review Renstra oleh Menpan RB untuk mengukur berapa persen pencari kerja yang terdaftar yang kompeten ditambah hasil uji kompetensi kerja yang dilakukan Disnaker	Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Lulusan SMK Ke atas Ditambah hasil pelaksanaan UJK Disnaker Dibanding Jumlah Pencari Kerja Terdaftar	Dinas Tenaga Kerja	1. Berdasarkan Permenaker RI. No. Per.24/MEN/IX/2009, tentang Penyelenggaraan Pemagangan di dalam Negeri  2. Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja
.		Jumlah Calon Wirausaha Baru	Orang	Target RPJMD 2013-2018; Penciptaan 100.000 wirausaha baru tahun 2018 yang dilakukan oleh Disnaker adalah melatih, melakukan pemagangan dan intermediasi perbankan terhadap 7500 calon	Jumlah Calon Wirausaha Baru Yang Dilatih	Dinas Tenaga Kerja	1. Berdasarkan Target RPJMD 2013-2018  2. Untuk Memenuhi Janji Walikota dan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
				wirusaha baru pada akhir tahun 2018.			Wakil Walikota
3.	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Jumlah Lowongan Pekerjaan Baru	lowongan kerja	Target RPJMD 2013-2018 adalah : penciptaan 250.000 lapangan pekerjaan baru; kontribusi disnaker 50.000 lowongan kerja pada akhir tahun 2018. kegiatan yang dilakukan adalah : melaksanakan bursa kerja/pameran kerja bursa kerja khusus (BKK) dan melalui bursa kerja online	Jumlah Lowongan Kerja Terdaftar	Dinas Tenaga Kerja	Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja, serta untuk memenuhi target RPJMD 2013-2015 sesuai janji kampanye Walikota dan Wakil Walikota, yaitu Penciptaan Lapangan Kerja
.		Prosentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	%	Target ini merupakan target SPM urusan ketenagakerjaan yang diakomodasi dalam RPJMD 2013-2018 dan selanjutnya dituangkan dalam IKU Renstra Disnaker tujuannya adalah untuk mengukur berapa persen penyerapan tenaga kerja dari pencari kerja terdaftar (yang membuat kartu AK-1/Kartu Kuning) yang terjadi pada tahun yang bersangkutan	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Dibanding Dengan Jumlah Pencari Kerja Terdaftar	Dinas Tenaga Kerja	1. Berdasarkan Permenaker RI. No. Per.2 tahun 2014 tentang SPM Bidang Ketenagakerjaan  2. Berdasarkan RPJMD 2013-2018
4.	Meningkatnya Perlindungan Ketenagakerjaan	Prosentase Perusahaan Yang Berkasus Tentang Ketenagakerjaan	%	target kinerja baru hasil reviu Renstra oleh Menpan tujuannya untuk mengukur persentase penurunan kasus yang masuk dibanding jumlah perusahaan berdasarkan wajib lapor ketenagakerjaan	Jumlah Kasus Yang Masuk Dibanding Dengan Jumlah Perusahaan Berdasarkan Wajib Lapor	Dinas Tenaga Kerja	Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja
.		Prosentase Kasus Yang Diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama (PB)	%	Merupakan target SPM urusan ketenagakerjaan yang diakomodir dalam RPJMD 2013-2018 dan selanjutnya dituangkan dalam IKU Renstra Disnaker tujuannya adalah untuk melihat berapa persen kasus PHI yang masuk yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB). Karena penyelesaian kasus PHI yang selesai melalui PB adalah indikator keberhasilan pejabat fungsional mediator, biasanya sisanya kasus PHI yang berlarut-larut tidak dapat diselesaikan dibuat Anjuran Pejabat.	Jumlah Kasus Yang Selesai Melalui Perjanjian Bersama (PB) Dibanding Dengan Jumlah Kasus Yang Masuk	Dinas Tenaga Kerja	Berdasarkan target RPJMD 2013-2018 Berdasarkan Permenpan No. Per.2 Tahun 2014 Tentang SPM Bidang Ketenagakerjaan
.		Prosentase Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	%	Salah satu target perlindungan ketenagakerjaan dalam menjamin kecelakaan kerja, penjaminan hari tua dan jaminan pensiun bagi para pekerja/buruh.	Jumlah Pekerja/Buruh Peserta Program Jamsostek Dibanding Dengan Jumlah Pekerja/Buruh Berdasarkan Wajib Lapor	Dinas Tenaga Kerja	Berdasarkan target RPJMD 2013-2018 Berdasarkan Permenpan No. Per.2 Tahun 2014 Tentang SPM Bidang Ketenagakerjaan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
.		Jumlah Perusahaan Yang Melaksanakan Peraturan Ketenagakerjaan	Perusahaan	Adalah merupakan target kinerja Disnaker hasil dari pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan agar melaksanakan dan mentaati peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. (hasil Verifikasi Menpan)	Akumulasi jumlah perusahaan yang melaksanakan minimal 10 (sepuluh) norma/peraturan ketenagakerjaan. Kriteria Norma ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja	Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja
.		Jumlah Perusahaan Yang Melaksanakan Wajib Laporan Ketenagakerjaan	Perusahaan	Adalah salah satu upaya Disnaker agar perusahaan mentaati peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, dimana dalam wajib lapor tersebut terdapat 33 item norma ketenagakerjaan yang harus dipatuhi oleh perusahaan. Selanjutnya dari wajib lapor tersebut menjadi bahan untuk menyusun keputusan atau kebijakan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.	Akumulasi Jumlah Perusahaan Yang Melakukan Wajib Lapor Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja	Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1981 tentang wajib lapor
5.	Meningkatnya Minat Bertransmigrasi	Jumlah Calon Transmigran Terseleksi	Calon jiwa	Target tersebut merupakan revisi dari target jumlah penempatan transmigran karena 2 tahun terakhir ini target tersebut tidak dapat direalisasikan sehubungan dengan penetapan kuota penempatan transmigran merupakan kewenangan pemerintah pusat. Atas saran tim reвью renstra Kemenpan target urusan ketrasmigrasian disesuaikan dengan kewenangan pemerintah daerah yaitu calon transmigran yang lulus seleksi awal.	Jumlah Calon Transmigran Yang Terseleksi	Dinas Tenaga Kerja	Berdasarkan UU No.29 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No, 15 Tahun 1997 tentang ketrasmigrasian

## 24. Dinas Perhubungan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Terkendalinya kemacetan lalu lintas	Persentase aspek penyebab kemacetan yang teratasi	%	Tingkat kemacetan yang belum teratasi	Jumlah aspek yang tertangani dibagi jumlah aspek yang harus ditangani kali 100%	Dinas Perhubungan	Semakin banyak aspek penyebab kemacetan yang teratasi maka kondisi lalu lintas semakin lancar
.		Kecepatan rata-rata tempuh kendaraan di jalan protokol pada saat jam sibuk	km / jam	Kemacetan sering kali terjadi di jalan protokol pada saat jam sibuk	Kecepatan rata-rata tempuh kendaraan bermotor	Dinas Perhubungan	Semakin rendah kecepatan rata-rata tempuh menandakan kondisi jalan semakin macet
2.	Terwujudnya sarana	Persentase angkutan	%	Kondisi kendaraan angkutan	Kendaraan angkutan umum yang	Dinas	Semakin tinggi persentase angkutan umum yang

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN / KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
	angkutan umum yang aman	umum yang laik jalan		umum yang laikjalan berpengaruh terhadap keselamatan penumpang	lulus uji dibagi jumlah kendaraan angkutan umum wajib uji x 100%	Perhubungan	laik jalan maka semakin tinggi keselamatan penumpang angkutan umum
.		Persentase Pengemudi angkutan yang umum yang memiliki SIM Umum	%	Pengemudi angkutan umum yang tidak memiliki SIM Umum lebih berpotensi terhadap angka kecelakaan lalu lintas	Jumlah pengemudi angkutan umum yang memiliki SIM Umum dibagi total pengemudi angkutan umum x 100%	Dinas Perhubungan	Semakin tinggi persentase pengemudi angkutan umum yang memiliki SIM Umum maka semakin tinggi keselamatan penumpang angkutan umum
.		Persentase penurunan pelanggaran angkutan umum di jalan	%	Pelanggaran lalu lintas berpotensi terjadinya kecelakaan lalu lintas	Selisih pelanggaran yang terjadi antara tahun n dan n-1 dibagi jumlah pelanggaran yang terjadi pada tahun n-1	Dinas Perhubungan	Semakin menurun tingkat pelanggaran lalu lintas maka semakin tinggi tingkat keselamatan penumpang angkutan umum
3.	Perpindahan moda penggunaan kendaraan angkutan	Rasio Pengguna kendaraan pribadi dan pengguna angkutan umum	%	Penggunaan kendaraan pribadi cenderung meningkat	Rasio pengguna angkutan pribadi dibandingkan dengan pengguna angkutan umum	Dinas Perhubungan	Semakin tinggi rasio pengguna kendaraan umum dibanding kendaraan pribadi maka semakin baik kondisi lalu lintas
4.	Kapasitas Kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandung semakin baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	nilai	Masih belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat khususnya pengguna transportasi	Nilai hasil survey	Dinas Perhubungan	Semakin tinggi nilai IKM maka semakin tinggi tingkat kepuasan masyarakat
.		Nilai evaluasi AKIP	nilai	Untuk mengukur akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan	Nilai hasil evaluasi AKIP	Dinas Perhubungan	Semakin tinggi nilai evaluasi AKIP maka semakin tinggi akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan
.		Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yg ditindaklanjuti	%	Untuk mendukung WTP	Jumlah Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti dibagi jumlah total temuan BPK/Inspektorat dikali 100%	Dinas Perhubungan	Semakin tinggi persentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti maka semakin baik pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dan aset daerah

## 25. Dinas Kebudayaan & Pariwisata

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN / KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Lestarnya Bangunan Cagar Budaya	Jumlah Bangunan Cagar Budaya (BCB) dalam kondisi baik dan	Angka	Sesuai dengan amanat Perda No. 19 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya bahwa setiap Bangunan Cagar Budaya harus mendapatkan perlindungan.	Dihitung berdasarkan akumulasi jumlah bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Walikota	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Terdapat lima kriteria untuk memutuskan suatu bangunan masuk menjadi bangunan cagar budaya. Kriteria tersebut ditinjau dari nilai sejarah, nilai arsitektur, nilai ilmu pengetahuan, nilai sosial budaya, dan usia

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN / KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
		terlindungi					bangunan minimal 50 tahun.
2.	Berkembangnya Seni Budaya Daerah	Jumlah Lingkung Seni/ Budaya yang aktif	Angka	Sesuai dengan amanat Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pelestarian Seni Tradisional bahwa setiap lingkung seni/budaya yang aktif harus mendapat legalitas	Dihitung berdasarkan akumulasi jumlah lingkung seni/budaya yang mendapat legalitas dari Disbudpar	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Lingkung Seni harus mendapatkan legalitas dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung
3.	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ke Kota Bandung	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	Sesuai dengan amanat Perda Nomor 01 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2012-2025 bahwa tujuan pembangunan kepariwisataan daerah adalah untuk meningkatkan kunjungan wisatawan	Dihitung berdasarkan akumulasi jumlah kunjungan wisatawan ke kota Bandung bekerja sama dengan dinas/instansi terkait (Dishub, PT. Jasa Marga, PT. KAI, Kantor Imigrasi, PT. Angkasa Pura) serta perhitungan akhir yang dikerjasamakan dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kunjungan Wisatawan terdiri dari Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara
4.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	Sesuai dengan amanat Kemenpan Nomor : Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah	Dihitung berdasarkan jumlah angket yang diberikan kepada masyarakat pemohon pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kualitas pelayanan publik yang prima

## 26. Dinas Bina Marga & Pengairan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN / KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Terwujudnya pembangunan infrastruktur jalan di PPK	Tingkat minimal keterbangunan Infrastruktur Jalan PPK Gedebage	%	Memenuhi target RPJP dan RPJMD	Panjang jalan terbangun (/) Panjang jalan rencana pembangunan (x) 100	Dinas Bina Marga dan Pengairan	
2.	Terwujudnya Infrastruktur jalan yang berkualitas dan merata	Rasio minimal ruas Jalan dalam kondisi baik	%	Memenuhi target SPM	Panjang jalan (-) Panjang jalan dalam kondisi rusak (/) Panjang jalan Kota Bandung (x) 100	Dinas Bina Marga dan Pengairan	kriteria kondisi jalan adalah bahwa setiap ruas jalan jalan harus memiliki kerataan permukaan jalan yang memadai bagi kendaraan untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman, dan nyaman (PERMEN PU NO. 14/PRT/M/2010 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)
.		Indeks aksesibilitas jalan	Skala	Memenuhi target SPM	Panjang jalan penghubung PK (/) Panjang jalan Kota Bandung (x) 100	Dinas Bina Marga dan Pengairan	Rencana penambahan indeks aksesibilitas jalan melalui Pembangunan Jalan di PPK Gedebage dan Pembangunan Fly over, dan jalan tembus.
.		Tingkat deviasi maksimal pemerataan pemeliharaan jalan	%	Memenuhi target RPJMD	Porsi tertinggi (-) rata-rata (/) rata-rata (x) 100 Atau	Dinas Bina Marga dan Pengairan	Pemerataan anggaran pemeliharaan jalan pada 6 wilayah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung No.13 Tahun 2007

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
					Porsi terendah (-) rata-rata (/) rata-rata (x) 100		ket : semakin rendah persentase capaian ( $\leq 20\%$ ) maka semakin merata pemeliharaan jalan di 6 wilayah Kota Bandung
3.	Terselesainya Permasalahan banjir di Kota Bandung	Presentase minimal saluran drainase yang berfungsi dengan baik	%	Memenuhi target SPP & SPM	Panjang jaringan drainase (-) Panjang drainase yang tidak berfungsi baik (/) Panjang jaringan drainase (x) 100	Dinas Bina Marga dan Pengairan	
.		Presentase minimal penanganan rutin banjir kurang dari 2 jam	%	Memenuhi target RPJMD	Jumlah lokasi banjir yang tertangani kurang dari 2 jam (/) Jumlah lokasi banjir (x) 100	Dinas Bina Marga dan Pengairan	Penanganan banjir yang dilakukan pada saat terjadi genangan/ banjir (response time)
.		Presentase minimal banjir terselesaikan	%	Memenuhi target RPJMD	Jumlah lokasi banjir terselesaikan (/) Jumlah lokasi banjir (x) 100	Dinas Bina Marga dan Pengairan	Penanganan banjir sampai tuntas sehingga jumlah titik banjir di Kota Bandung akan berkurang
4.	Terwujudnya Bandung caang Baranang	Presentase minimal jumlah PJU terbangun yang berfungsi baik	%	Memenuhi target SPP & SPM	Jumlah PJU (-) Jumlah PJU padam (/) Jumlah PJU (x) 100	Dinas Bina Marga dan Pengairan	
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Sesuai Amanat UU No.25/2009 ttg Pelayanan publik	Sesuai dengan SK Menpan No.16 Tahun 2014 tentang survey kepuasan masyarakat	Dinas Bina Marga dan Pengairan	

## 27. Dinas Pemakaman dan Pertamanan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH).	Prosentase RTH yang berkualitas	%	Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.	RTH yang berkualitas ----- x 100 % RTH eksisting	Dinas Pemakaman dan Pertamanan	RTH yang berkualitas adalah RTH yang memiliki fungsi ekologi, sosial dan estetika.
2.	Meningkatnya kualitas taman di Kota Bandung.	Prosentase taman dalam kondisi baik	%	Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.	Taman dalam kondisi baik ----- x 100 % Taman di Kota Bandung	Dinas Pemakaman dan Pertamanan	Perlu adanya pembagian kriteria taman sebagai berikut : - Taman yang berfungsi untuk aktivitas publik - Taman yang hanya berfungsi sebagai estetika kota Kriteria utama taman dalam kondisi baik :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia elemen estetika</li> <li>- Tersedia utilitas taman</li> <li>- Tersedia fasilitas taman</li> </ul>
3.	Meningkatnya kualitas TPU (Taman Pemakaman Umum).	Prosentase makam dalam kondisi baik	%	Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.	$\frac{\text{(Jumlah makam yang dirumputisasi)} \times 100\%}{\text{Jumlah makam yang dikelola Pemerintah Kota Bandung}}$	Dinas Pemakaman dan Pertamanan	
.		Prosentase TPU yang baik	%	Untuk mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan, maka pembangunan infrastruktur dan sarana kota merupakan faktor penting dalam pembangunan skala prioritas. Termasuk penataan dan pengelolaan TPU sebagai sarana publik. Sehingga pengunjung merasa nyaman.	$\frac{\text{Jumlah TPU yang baik}}{\text{Jumlah TPU di Kota Bandung}} \times 100\%$	Dinas Pemakaman dan Pertamanan	Kriteria utama TPU dalam kondisi baik : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia toilet</li> <li>- Tersedia lampu penerangan (PJU dan lampu taman)</li> <li>- Tersedia ruang pelayanan publik</li> <li>- Adanya identitas TPU</li> <li>- Adanya papan informasi Perda</li> <li>- Terpeliharanya kebersihan TPU</li> </ul>
.		Daya tampung makam	Makam	Bertambahnya jumlah penduduk berdampak pada kebutuhan akan lahan untuk pemakaman.	$\frac{\text{Luas lahan TPU yang masih dapat digunakan}}{\text{Luas lahan per makam}}$	Dinas Pemakaman dan Pertamanan	
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja.	Nilai hasil evaluasi AKIP	Nilai	Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.	Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.	Dinas Pemakaman dan Pertamanan	Hasil evaluasi AKIP oleh Inspektorat.
.		Prosentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	%	Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.	Temuan BPK/Inspektorat bidang keuangan yang ditindaklanjuti dari seluruh jumlah temuan BPK/Inspektorat pada tahun berjalan.	Dinas Pemakaman dan Pertamanan	Berita acara penyelesaian tindak lanjut temuan BPK/Inspektorat.

**28. Dinas Koperasi UKM & Perindustrian Perdagangan**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas koperasi yang berdaya saing;	Persentase Koperasi Aktif;	%	Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian	$\frac{\text{jumlah koperasi aktif}}{\text{total koperasi}} \times 100\%$	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan	melakukan pembinaan ke koperasi-koperasi yang tidak aktif dan ke pra koperasi untuk mendorong pertumbuhan koperasi aktif
.		Persentase Koperasi Sehat.	%	Berdasarkan PP No. 09/1995 tentang pelaksanaan kegiatan USP oleh Koperasi dan Permeneg No. 19/2008 tentang pedoman pelaksanaan kegiatan USP oleh Koperasi	$\frac{\text{jumlah koperasi sehat}}{\text{jumlah koperasi aktif}} \times 100\%$	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan	meningkatkan koperasi sehat terlihat dari sistem pengelolaan administrasi dan keuangan melalui pembinaan dan pengawasan
2.	Meningkatnya SDM koperasi dan UKM.	Persentase Koperasi berkualitas;	%	Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian	$\frac{\text{Exsisting yang telah didiklat} + \text{Jumlah yang didiklat}}{\text{jumlah koperasi aktif}} \times 100\%$	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan	melalui pelaksanaan diklat, bimtek, workshop, dll.
.		Persentase UMKM berkualitas	%	Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, PP No. 32 Tahun 1998 tentang pembinaan dan pengembangan usaha kecil dan Perwal Kota Bandung No. 413 Tahun 2010	$\frac{\text{Exsisting yang telah didiklat} + \text{Jumlah yang didiklat}}{\text{jumlah UMKM}} \times 100\%$	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan	melalui pelaksanaan diklat, bimtek, workshop, dll.
.		Jumlah Wirausaha Baru UMKM;	Orang	Merupakan Janji Walikota dan Wakil Walikota	Jumlah wirausaha baru	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan	Jumlah wirausaha baru akan dilaksanakan pada tahun 2015 dengan tahapan yaitu pendaftaran, seleksi/wawancara, pelatihan, magang, pendampingan, pelepasan, fasilitasi pameran dan fasilitasi permodalan melalui BPR Kota Bandung. Pencapaian target wirausaha baru, melalui kolaborasi beberapa SKPD dan instansi terkait.
3.	Meningkatnya pelaku usaha koperasi, UKM, industri dan perdagangan	Jumlah lapangan pekerjaan baru	Orang	Merupakan Janji Walikota dan Wakil Walikota	Jumlah lapangan pekerjaan	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan	Jumlah lapangan pekerjaan baru akan dilaksanakan pada Tahun 2015 melalui pelatihan
4.	Meningkatnya mutu produk industri;	Jumlah IKM yang memiliki sertifikat produk (Halal/HKI);	Ikm	Sertifikat halal merupakan ukuran mutu kehalalan suatu produk dan sertifikat kepemilikan merk (HKI) menjadi kepastian hukum	Jumlah IKM yang memiliki sertifikat Halal/HKI	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN / KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
				bagi pemilik produk			
5.	Berkembangnya Nilai Ekspor	Nilai ekspor Kota Bandung	US\$	Berdasarkan Permendag No. 22/M-DAG/PER/3/2015 tentang ketentuan dan tatacara penerbitan SKA	Jumlah Penerbitan SKA Kota Bandung	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan	Nilai ekspor dilihat dari realisasi SKA Kota Bandung. Satuan nilai yaitu US\$, berdasarkan nilai yang tercantum pada pemberitahuan ekspor barang yang dikeluarkan oleh Bea Cukai
6.	Peningkatan usaha sektor perdagangan.	Jumlah unit usaha sektor perdagangan formal yang meningkat statusnya : - Pedagang Mikro - Pedagang Kecil - Pedagang Kecil - Pedagang Menengah - Pedagang Menengah - Pedagang Besar	unit usaha	Berdasarkan Perda Kota Bandung No. 12 Tahun 2002 tentang ketentuan dan tatacara pemberian ijin usaha industri, ijin usaha perdagangan, wajib daftar perusahaan dan tanda daftar gudang	Jumlah penerbitan SIUP Kota Bandung	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan	
.		Jumlah pelaku usaha sektor perdagangan non formal yang menjadi Pedagang Formal	pelaku usaha	Akses pengajuan perijinan semakin mudah	Jumlah pedagang non formal yang mengajukan SIUP	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan	
7.	Meningkatnya Kualitas laporan keuangan dan AKIP yang optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Amanat UU No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan	

## 29. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN / KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Terjaganya ketersediaan pangan.	Score Pola Pangan Harapan (PPH)	Nilai	Score Pola Pangan Harapan (PPH) sesuai dengan sasaran operasional pada RPJMD dan merupakan SPM Bidang Ketahanan Pangan.	Cara Perhitungan PPH : Penyediaan pangan terdiri dari komponen produksi, perubahan stok, impor dan ekspor. Rumus penyediaan pangan adalah:	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Pola pangan harapan merupakan suatu metode yang digunakan untuk menilai jumlah dan komposisi atau ketersediaan pangan. Pola pangan harapan biasanya digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan wilayah. Dalam

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
					$Ps = Pr - \Delta St + Im - Ek$ Dimana : Ps : Total penyediaan dalam negeri Pr : Produksi $\Delta St$ : Stok akhir - stok awal Im : Impor Ek : Ekspor		<p>menentukan PPH ada beberapa komponen yang harus diketahui diantaranya yaitu konsumsi energi dan zat gizi total, persentase energi dan gizi aktual, dan skor kecukupan energi dan zat gizi.</p> <p>Dengan pendekatan Pola Pangan Harapan dapat dinilai mutu pangan penduduk berdasarkan skor pangan (<i>dietary score</i>). Semakin tinggi skor mutu pangan, menunjukkan situasi pangan yang semakin beragam dan semakin baik komposisi dan mutu gizinya</p>
		Penguatan Cadangan Pangan Daerah	Ton	Penguatan cadangan pangan equivalen beras sesuai dengan sasaran strategis yang ada di RPJMD dan merupakan SPM Bidang Ketahanan Pangan	Cara Pengukuran Indikator Penguatan Cadangan Pangan yaitu Pemerintah Kota harus menyediakan cadangan pangan kota equivalen beras mulai tahun 2014 sebanyak 24 ton, selanjutnya dari tahun 2015-2018 sebesar 60 ton setiap tahunnya.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial dan/atau menghadapi keadaan darurat.
		#Tingkat Konsumsi Pangan :#1. Beras	kg/kapita/tahun	<p>Tingkat ketergantungan masyarakat terhadap konsumsi beras sebagai makanan pokok sangat mengkhawatirkan. Beras telah menjadi pemasok utama karbohidrat bagi mayoritas masyarakat Kota Bandung. Persepsi masyarakat bahwa jika belum mengkonsumsi beras maka dikatakan belum makan meskipun perut diisi dengan makanan lain. Hal ini yang mengakibatkan tingkat konsumsi beras perkapita penduduk meningkat tiap tahunnya.</p> <p>Kita masih tetap mengalami krisis beras pada musim-musim tertentu. Berdasarkan masalah tersebut, diperlukan diversifikasi pangan sebagai pengganti beras agar masyarakat tidak lagi bergantung pada beras dan menjadikannya sebagai komoditi utama bahan pokok sehingga mampu meminimiliasi konsumsi beras.</p>	RUMUS PENGHITUNGAN KONSUMSI BERAS : $= \sum \text{BERAS YANG MASUK} + \sum \text{RASKIN} + \sum \text{PRODUKSI KOTA BANDUNG}$ $\sum \text{PENDUDUK}$	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	<p>Diversifikasi pangan diartikan sebagai pengurangan konsumsi beras yang dikompensasi oleh penambahan konsumsi bahan pangan non-beras diiringi dengan ditambahnya makanan pendamping. Diversifikasi konsumsi pangan juga dapat didefinisikan sebagai jumlah jenis makanan yang dikonsumsi, sehingga semakin banyak jenis makanan yang dikonsumsi akan semakin beranekaragam.</p> <p>Dimensi diversifikasi konsumsi pangan tidak hanya terbatas pada pangan pokok tetapi juga pangan jenis lainnya, karena konteks diversifikasi tersebut adalah meningkatkan mutu gizi masyarakat secara kualitas dan kuantitas, sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.</p>

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
.		#Tingkat Konsumsi Pangan :#2. Daging	kg/kapita/tahun	Diversifikasi pangan adalah salah satu upaya untuk memperluas pilihan masyarakat dalam mengkonsumsi pangan, termasuk pangan sumber protein hewani seperti daging.Penyediaan pangan, termasuk pangan asal hewan akan terus menjadi tantangan bagi Negara manapun di dunia, termasuk Indonesia, terutama karena pertumbuhan penduduk dan tingkat pendapatan. Dengan demikian, penganeekaragaman dan keterjangkauan pangan untuk mencukupi kebutuhan gizi masyarakat menjadi sangat penting.	<p>RUMUS PENGHITUNGAN KONSUMSI DAGING :</p> $= \frac{\sum \text{DAGING YANG MASUK} + \sum \text{PRODUKSI KOTA BANDUNG}}{\sum \text{PENDUDUK}}$	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	<p>Tingkat konsumsi daging, seperti halnya konsumsi komoditas lainnya, sangat dipengaruhi oleh preferensi atau cita rasa, dan harga komoditi yang bersangkutan apakah terjangkau harganya oleh masyarakat atau tidak.</p> <p>Dalam kasus peningkatan harga daging sapi yang diikuti dengan peningkatan konsumsi daging unggas menunjukkan bahwa daging unggas bersifat substitusi terhadap daging sapi, dimana konsumen akan memilih daging unggas pada saat harga daging sapi naik</p>
.		#Tingkat Konsumsi Pangan :#3. Ikan	kg/kapita/tahun	Tingkat konsumsi ikan per kapita masyarakat Kota Bandung masih rendah, meski konsumsi ikan masih rendah namun dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.	<p>RUMUS PENGHITUNGAN KONSUMSI IKAN :</p> $= \frac{\sum \text{IKAN YANG MASUK} + \sum \text{PRODUKSI KOTA BANDUNG}}{\sum \text{PENDUDUK}}$	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	<p>Ikan adalah makanan yang rendah kalori, berprotein tinggi yang baik untuk otak. Semua manfaat tersebut berasal dari asam omega 3 lemak tak jenuh ganda, populer disebut sebagai omega 3, yang banyak terdapat dalam minyak ikan.</p> <p>Tubuh manusia tidak bisa secara alami menghasilkan omega 3. Meski demikian nutrisi tersebut dibutuhkan oleh tubuh agar sehat.</p> <p>Hubungan antara omega 3 dan kesehatan jantung sudah sejak lama kita tahu. Namun, beberapa penelitian baru menunjukkan cukup bukti, bahwa ikan yang tinggi asam lemak sangat penting untuk kesehatan tubuh secara umum.</p>
2.	Meningkatnya produksi dan produktivitas hasil pertanian dan perikanan.	Produktivitas tanaman padi	kw/ha	Padi merupakan tanaman pangan utama bagi penduduk Indonesia. Kebutuhan akan pangan ini akan terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan peningkatan konsumsi per kapita akibat peningkatan pendapatan. Namun dilain pihak, upaya peningkatan produksi padi saat ini terganjal oleh banyak kendala, seperti konversi lahan yang menurunkan luas panen dan penyimpangan iklim yang dapat menyebabkan penurunan produktivitas.	<p>Cara Pengukuran Indikator Produktivitas tanaman padi adalah :</p> $\text{Produktivitas} = \frac{\text{Produksi (Kw)}}{\text{Luas Panen (Ha)}}$	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	<p>Semakin langkanya lahan pertanian menyebabkan terjadinya persaingan penggunaan lahan, sehingga mendorong pemanfaatan sumberdaya lahan secara optimal, terarah dan berkelanjutan dengan memperhatikan berbagai kebutuhan.</p> <p>upaya peningkatan produktivitas padi dengan mengoptimalkan sumberdaya lahan yang masih tersisa dapat dilakukan dengan lebih efisien bila dilaksanakan pada lahan-lahan yang sesuai atau lahan dengan kondisi fisik</p>

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							yang sangat mendukung dan juga dengan penggunaan teknologi tepat guna.
		Produksi tanaman hias	Pot/tahun	Bunga sebagai salah satu bagian dari tanaman hias dalam kelompok hortikultura, salah satu obyek yang memiliki nilai ekonomi yang tidak bisa diabaikan, selain memiliki keindahan juga memiliki berbagai kegunaan bila dimanfaatkan dengan tepat dan benar. Kota Bandung dengan keterbatasan lahannya harus bisa memilih tanaman hias yang memiliki nilai ekonomi tinggi.	Untuk pengukuran Produksi tanaman hias, yaitu : Jumlah tanaman hias dalam pot/tahun.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Berkaca dari sejarah, kota Bandung telah menjadi icon bagi berbagai kota lain di Indonesia karena keberhasilannya mengembangkan tanaman hortikultura dari jenis bunga-bunga tersebut, sehingga wajar bila kota Bandung mendapat julukan sebagai Kota Kembang bahkan dalam istilah asing dikenal juga dengan sebutan Paris Van Java karena keindahannya di masa-masa dahulu.  Ada 11 komoditas florikultur baik dalam bentuk bunga potong maupun tanaman hias, yang aktif dikomersialkan di kota Bandung, yaitu terdiri dari anggrek, anthurium, anyelir, garbera, gladiol, heliconia, krisan, mawar, sedap malam, melati dan palem.
		#Populasi ternak :#1. sapi	ekor	Peningkatan jumlah populasi ternak sapi merupakan target pemerintah pusat yang harus dilaksanakan dalam rangka mendukung program percepatan swasembada daging sapi di Indonesia.	Cara Pengukuran Indikator Populasi Ternak Sapi adalah :  <u>Formulasi Penghitungan :</u>  Populasi = Po + Kelahiran - kematian - (Pemotongan + unregister) - Pengeluaran + Pemasukan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Maraknya pemotongan sapi betina berujung kepada turunnya populasi sapi nasional. Berdasarkan sensus pertanian Badan Pusat Statistik (BPS), populasi ternak sapi potong dan sapi perah turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sampai dengan pelaksanaan sensus per 3 Juni 2013, menurut hitungan BPS, populasi ternak sapi potong, sapi perah dan kerbau sekitar 13,27 juta ekor. Padahal pada periode tahun sebelumnya, populasi ternak sapi dan kerbau mencapai sekitar 16,49 juta ekor. Penurunan populasi sapi dan kerbau itu terjadi hampir di seluruh wilayah di Indonesia terutama wilayah sentra populasi sapi. Di Jawa Timur, populasi sapi turun 26,16%. Sedangkan di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, populasi sapi merosot 24,87% sampai 28,37%. Begitu pun dengan populasi sapi dan kerbau di Nusa Tenggara. Jumlahnya merosot hampir 15%.
		#Populasi ternak :#2. domba	ekor	Peningkatan populasi ternak domba merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan swasembada pangan ternak.	Cara Pengukuran Indikator Populasi Ternak Domba adalah :  <u>Formulasi Penghitungan :</u>  Populasi = Po + Kelahiran - kematian - (Pemotongan + unregister) - Pengeluaran +	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Populasi ternak domba di Kota Bandung setiap tahunnya terus meningkat walaupun dengan keberadaan lahan peternakan yang terbatas tetapi peternak domba di Kota Bandung bisa tetap mengembangkan usahanya. Peternak domba di Kota Bandung

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
					Pemasukan		melakukan kegiatan untuk meningkatkan populasi, produktivitas, dan mutu bibit domba, meningkatkan skala usaha domba menjadi skala usaha ekonomis, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak, mengembangkan usaha kelembagaan kelompok domba, menciptakan kawasan sumber bibit domba di Kota Bandung, dan pelestarian plasma nuftah domba lokal.
		#Produksi ikan :#1. konsumsi	Ton	Sektor perikanan, khususnya perikanan air tawar dilakukan dalam skala kecil karena keterbatasan lahan dan lingkungan padat penduduk.	<u>Formulasi</u> <u>Penghitungan :</u> produksi Ikan Konsumsi : $= \text{Luas lahan (kolam)} \times \text{padat tebar} - \text{kematian}$ et: ematian = rata-rata 10 % adat tebar tergantung jenis dan perlakuan (teknologi)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Untuk produksi ikan konsumsi diperoleh dari beberapa jenis ikan seperti ikan mas, nila, mujair, lele, sepat siam, tambakan dan ikan lainnya yang dikembangkan di kolam maupun di sawah, dengan penyumbang produksi terbesar adalah Ikan Lele, diikuti oleh Ikan Mas, Nila, tambakan, Mujair, ikan lainnya dan Ikan Sepat Siam.
		#Produksi ikan :#2. hias	ekor	Sebagai alternatif pilihan usaha masyarakat dibidang perikanan yaitu usaha budidaya ikan hias karena selain tidak memerlukan lahan yang luas, potensi pemasaran ikan hias baik pasar lokal maupun ekspor cukup besar.	produksi Ikan Hias : $= \text{Luas lahan (kolam)} \times \text{padat tebar} - \text{kematian}$ et: ematian = rata-rata 10 % adat tebar tergantung jenis dan perlakuan (teknologi)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Jenis ikan hias yang sering diusahakan di Kota Bandung ada 13 jenis, yaitu Barbir, Cupang, Frontosa, Gapi, Leuleupi, Udang Hias, Louhan, Manvis, Mas Koki, Molly, Plati, Rainbow, dan Sapu Hias, dengan penyumbang produksi terbesar adalah ikan Mas Koki dan Udang Hias.
3.	Terkendalinya kasus penyakit zoonosa	Jumlah kasus penyakit zoonosa di Kota Bandung	kasus	Kota Bandung sebagai kota besar berpotensi terjadinya penyebaran penyakit hewan yang menular kepada manusia (zoonosa).	Cara Pengukuran Indikator jumlah kasus penyakit zoonosa yaitu jumlah kejadiankasus yang ditargetkan tidak akan lebih dari 8 kasus.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Penyakit zoonosa merupakan penyakit atau infeksi pada binatang yang dapat ditularkan kepada manusia. Penyakit yang tergolong dalam zoonosa misalnya, Antraks, Rabies, Brucellosis, Avian Influenza, dan lain-lain. Kota Bandung merupakan pusat pemasaran ternak terbesar di Jawa Barat, sehingga resiko masuknya penyakit zoonosa dari daerah asal ternak ke Kota Bandung relatif tinggi.
4.	Menurunnya produk pangan segar yang tercemar	Jumlah pangan segar yang tercemar	kasus	Masih adanya kasus-kasus penyalahgunaan bahan kimia berbahaya pada produk pertanian	Cara pengukuran adalah dengan menghitung jumlah kasus pangan segar yang tercemar setelah adanya uji laboratorium.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Salah satu tugas pokok dan fungsi pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah mengawasi dan memeriksa komoditi pangan segar yang terdiri dari komoditi peternakan (daging, susu, telur), perikanan dan komoditi tanaman pangan dan hortikultura ( sayuran,

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							buah-buahan, beras dan palawija).  Untuk itu sangat diperlukan adanya beberapa cara/metode untuk pengawasan dan pemeriksaannya, agar dihasilkan pangan segar yang aman dan layak untuk dikonsumsi. Pangan segar yang aman dan layak untuk dikonsumsi adalah pangan yang bebas dari berbagai cemaran, baik itu cemaran secara fisik, zat kimia berbahaya, cemaran mikroba dan cemaran residu <i>antibiotic</i> , residu <i>hormone</i> , residu pestisida dan juga logam berbahaya (logam berat).
5.	Bertambahnya pelaku usaha di bidang pertanian dan perikanan	#Jumlah pelaku usaha di bidang pertanian dan perikanan :#1. Budidaya	pelaku usaha	Indikator jumlah pelaku usaha budidaya di bidang pertanian dan perikanan untuk mendukung indikator sasaran di RPJMD 2013-2018 yaitu terciptanya wira usaha baru	Cara Pengukuran adalah :  Jumlah pelaku usaha baru setelah dilakukan pelatihan dan diberikan bantuan.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Penambahan jumlah pelaku usaha ini diantaranya terdiri dari pelaku usaha budidaya padi, tanaman palawija, peternak sapi, peternak domba maupun budidaya ikan hias dan ikan konsumsi.
.		#Jumlah pelaku usaha di bidang pertanian dan perikanan :#2. Olahan	pelaku usaha	Indikator jumlah pelaku usaha olahan di bidang pertanian dan perikanan untuk mendukung indikator sasaran yang di RPJMD 2013-2018 yaitu terciptanya wira usaha baru	Cara Pengukuran adalah :  Jumlah pelaku usaha baru setelah dilakukan pelatihan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Penambahan jumlah pelaku usaha ini diantaranya terdiri dari pelaku usaha olahan keripik singkong, olahan pindang presto dan ikan bandeng, olahan nugget, baso, sosis sapi dan ayam, olahan kerupuk kentang, olahan rangginang, olahan abon ikan lele, dan olahan duri ikan
6.	Meningkatnya keterampilan pelaku usaha yang menggunakan sarana teknologi pertanian dan perikanan.	#Jumlah pelaku usaha yang menggunakan sarana teknologi pertanian dan perikanan :#1. Budidaya	pelaku usaha	Tingginya persaingan usaha memacu para pelaku usaha untuk melakukan inovasi terhadap hasil usahanya. Salah satunya dengan penerapan teknologi. Dalam usaha bidang pertanian, penggunaan sarana teknologi pertanian dibutuhkan untuk meningkatkan produksi dan mempermudah para pelaku usaha dalam memproduksi barangnya.	Cara Pengukuran adalah :  Jumlah pelaku usaha baru yang menggunakan sarana teknologi pertanian dan perikanan budidaya.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Penambahan jumlah pelaku usaha budidaya yang menggunakan teknologi diantaranya terdiri dari pelaku usaha budidaya tanaman hias dan sayuran dengan menggunakan teknologi hidroponik, kultur jaringan; juga pelaku usaha budidaya ternak sapi dengan inseminasi buatan.
.		#Jumlah pelaku usaha yang menggunakan sarana teknologi	pelaku usaha	Tingginya persaingan usaha memacu para pelaku usaha untuk melakukan inovasi terhadap hasil usahanya. Salah satunya dengan penerapan	Cara Pengukuran adalah :  Jumlah pelaku usaha baru yang menggunakan sarana teknologi	Dinas Pertanian dan Ketahanan	Penambahan jumlah pelaku usaha yang menggunakan teknologi ini diantaranya pelaku usaha olahan pindang presto menggunakan panci presto, olahan bakso

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
		pertanian dan perikanan :#2. Olahan		teknologi. Dalam usaha bidang pertanian, penggunaan sarana teknologi pertanian dibutuhkan untuk meningkatkan produksi dan mempermudah para pelaku usaha dalam memproduksi barangnya.	pertanian dan perikanan olahan.	Pangan	menggunakan mesin pencetak bakso, dan olahan abon menggunakan mesin pengering abon (spinner). Para pelaku usaha ini ada yang tergabung dalam satu kelompok usaha ada juga kelompok usaha perorangan.

### 30. Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Berkembangnya tata kelola pemerintahan berbasis e-government	Prosentase SKPD yang sudah menerapkan e-government/aplikasi pemerintahan yang terintegrasi	%	Belum semua SKPD terkoneksi secara online	Jumlah aplikasi/jmlh target 150 aplikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
.		Prosentase pemenuhan informasi pemerintahan pada bandung Command Center	%	Masih belum terpusatnya data informasi dari masing-masing SKPD	Jumlah SKPD yang terkoneksi data dengan Bandung Command Center	Dinas Komunikasi dan Informatika	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
2.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Infrastruktur Jaringan	Prosentase fasilitas umum yang sudah memiliki wifi	%	Tingginya masyarakat dalam mencari informasi melalui internet	Jumlah fasilitas umum yang sudah dipasang wifi di Kota Bandung	Dinas Komunikasi dan Informatika	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
3.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu	%	Belum semua SKPD menindaklanjuti pengaduan masyarakat dengan cepat	Jumlah tindaklanjut SKPD/jumlah pengaduan yang diterima Diskominfo	Dinas Komunikasi dan Informatika	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
.		Prosentase SKPD yang sudah melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	%	Belum maksimalnya para Pejabat Pengelola Data Informasi (Pedasi) di SKPD dan BUMD	Jumlah SKPD yang sudah memiliki Pengelola Data Informasi (Pedasi) secara online	Dinas Komunikasi dan Informatika	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
4.	Membangun citra positif Kota	Rasio berita positif dan negatif di media tentang	%	Masih adanya pemberitaan yang negatif terhadap Kota Bandung	Jumlah berita tentang Pemerintah Kota Bandung	Dinas Komunikasi	Program Kerjasama Informasi dengan mass media

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN / KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
	Bandung di media	Pemerintah Kota Bandung				dan Informatika	
5.	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Tingkat Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika	%	Sesuai amanat Permen Kominfo Nomor: 22/PER/M.KOMINFO/12/12/2010 Tanggal 20 Desember 2010	Sesui Permen Kominfo Nomor: 22/PER/M.KOMINFO/12/12/2010	Dinas Komunikasi dan Informatika	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa; Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi serta Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media

### 31. Dinas Pemuda dan Olah Raga

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN / KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya Kemandirian Pemuda dalam Pembangunan Daerah	Persentase organisasi Pemuda yang mandiri	%	Berdasarkan Amanat UU No.40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan	<u>Organisasi Pemuda yang Mandiri</u> Organisasi Pemuda di Kota Bandung  X 100%	Dinas Pemuda dan Olah Raga	
2.	Meningkatnya Prestasi Olahraga Pelajar	Persentase nomor cabang olahraga pelajar yang meraih medali dalam kompetisi tingkat Jawa Barat	%	Berdasarkan Amanat UU No.3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional	- Jumlah Medali Emas yang diperoleh  - Jumlah Medali Perak yang diperoleh  - Jumlah Medali Perunggu yang diperoleh	Dinas Pemuda dan Olah Raga	
3.	Meningkatnya Event Olahraga Masyarakat	Persentase Kecamatan yang melaksanakan olahraga masyarakat secara rutin	%	Berdasarkan Amanat UU No.16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Olahraga	<u>Jumlah Kecamatan yang melaksanakan Olahraga Masyarakat</u> Jumlah Kecamatan di Kota Bandung  X 100%	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase
4.	Meningkatnya Sarana Prasarana Pemuda	Persentase Kecamatan yang memiliki Sarana dan Prasana Pemuda	%	Berdasarkan Amanat UU No.40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan	<u>Jumlah Kecamatan yang memiliki Sarana dan Prasarana Pemuda</u> Jumlah Kecamatan di Kota	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN / KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
					Bandung X 100 %		
5.	Meningkatnya Sarana Prasarana dan Olahraga	Persentase Kecamatan yang memiliki Sarana dan Prasarana olahraga	%	Berdasarkan Amanat UU No. 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Olahraga	<u>Jumlah Kecamatan yang memiliki Sarana dan Prasarana Olahraga</u> Jumlah Kecamatan di Kota Bandung X 100%	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Persentase

### 32. Kecamatan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN / KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan dan kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	Untuk mengetahui mutu pelayanan Kecamatan Sukasari	Hasil survey Kepuasan Masyarakat (Permenpan 16 / 2014 dan SK Menpan No. 25/2004)	Kecamatan	melalui 14 unsur pelayanan, yaitu: 1. prosedur pelayanan; 2. Persyaratan pelayanan; 3. Kejelasan petugas pelayanan; 4. Kedisiplinan petugas pelayanan; 5. Tanggung jawab petugas pelayanan; 6. Kemampuan petugas pelayanan; 7. Kecepatan pelayanan; 8. Keadilan mendapatkan pelayanan; 9. Kesopanan dan keramahan petugas; 10. Kewajaran biaya pelayanan; 11. Kepastian biaya pelayanan; 12. Kepastian jadwal pelayanan; 13. Kenyamanan lingkungan; 14. Keamanan pelayanan.
.		Prosentase Keluhan/Pengaduan Pelayanan Administratif yang Ditindaklanjuti	%	sebagai alat ukur kekurangan serta kesalahan dalam melakukan pelayanan.	Perbandingan antara jumlah keluhan/pengaduan pelayanan administrasi yang ditindaklanjuti dengan jumlah seluruh pengaduan pelayanan administrasi X 100%	Kecamatan	Keluhan/pengaduan adalah ketidaksesuaian kualitas pelayanan yang dialami oleh masyarakatn sebagaimana maklumat dan standar pelayanan yang dijanjikan oleh penyelenggara layanan, baik secara tertulis, media sosial, elektronik dan lain lain. apabila tidak ada keluhan atau zero complain maka capaian kinerja adalah 100%.
2.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan (TUP) kecamatan.	Prosentase Pelayanan Administrasi Kependudukan (KTP & KK) Tepat Waktu	%	untuk mengetahui pelayanan kependudukan yang tepat waktu	Adalah jumlah prosentase KTP tepat waktu ditambah prosentase KK tepat waktu dibagi 2 X 100%  cara penghitungan prosentase KTP tepat waktu adalah perbandingan antara jumlah KTP yang dilayani tepat waktu dengan Jumlah seluruh pelayanan KTP yang dilaksanakan X 100%  Cara penghitungan prosentase KK tepat waktu adalah perbandingan antara jumlah KK	Kecamatan	Pelayanan administrasi kependudukan yang dihitung adalah pelayanan dokumen: 1. KTP 2. KK

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
					yang dilayani tepat waktu dengan jumlah seluruh layanan KK yang dilaksanakan X 100%		
.		Prosentase Waktu Pelayanan Administrasi Umum Lainnya Tepat Waktu	%	untuk mengetahui pelayanan administrasi umum lainnya tepat waktu sebagai bagian dari tugas dan fungsi Kecamatan Sukasari	(Jumlah total prosentase jenis layanan umum) : 5	Kecamatan	Jenis layanan umum yang dihitung adalah: 1. Legalisasi 2. Surat Keterangan Tidak Mampu/Surat Keterangan Miskin 3. SKCK 4. Domisili Perusahaan 5. Domisili Kelembagaan
.		Prosentase Kelurahan Yang Memenuhi Standar Kriteria Baik	%	untuk memacu kegiatan keurahan agar selalu memenuhi kriteria keurahan baik	Perbandingan antara jumlah keurahan yang memenuhi 4 kriteria dengan Jumlah keurahan se-Kecamatan Sukasari X 100%	Kecamatan	Kriteria Kelurahan Baik: 1. Menyampaikan minimal 75% dari seluruh laporan rutin tepat waktu 2. Menuntaskan dan atau turut serta membantu penuntasan minimal 75% dari keluhan masyarakat dalam pelayanan administratif; 3. Rasio sumur resapan dengan jumlah RW adalah 1 : 1 dengan kondisi berfungsi baik 4. Rasio jumlah lubang biopori dengan jumlah RT se-Kecamatan Sukasari adalah 1 : 1 dengan kondisi berfungsi baik; 5. Kerb Telah Dicat Warna Hitam Dan Putih Tidak Pudar Pada TriwulanKe 3 Setiap Tahun 6. Terpelihara/ Tidak Ada Rumput Liar / Gulma Yang Mencolok Setiap Triwulan
.		Prosentase RW Juara	%	untuk mendukung program program Road Map / Rencana Aksi Walikota Bandung dalam percepatan mencapai Bandung Juara	Perbandingan antara jumlah RW yang memenuhi kriteria dengan jumlah RW se-Kecamatan Sukasari X 100%	Kecamatan	3 Kriteria RW yang dilakukan pengukuran untuk capaian indikator ini: 1. RW memiliki kelompok masyarakat yang mengelola sampah minimal 1 (satu) metoda pengelola sampah berbasis masyarakat; 2. RW yang memenuhi syarat administrasi 3. RW yang memenuhi minimal 5 kriteria dari 21 kriteria RW/Kampung Juara  A. Salah Satu Dari Metode Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat : 1. Terdapat Kelompok Masyarakat Yang Mengelola Komposter Skala Rumah Tangga 2. Terdapat Kelompok Masyarakat Yang

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN / KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							<p>Mengelola Bank Sampah</p> <p>3. Terdapat Kelompok Masyarakat Yang Mengelola Salah Satu Metode 3 R</p> <p>4. Terdapat Kelompok Masyarakat Yang Mengelola Biodigester</p> <p>5. Terdapat Kelompok Masyarakat Yang Mengelola Sampah Dengan Metode Lainnya Selain Pengangkutan Sampah Dari Rumah Ke TPS.</p> <p>B. Syarat Administratif, RW Menyampaikan:</p> <p>1. Menyampaikan Laporan Rutin Kependudukan Rutin Minimal Per Triwulan</p> <p>2. Menyampaikan Laporan Penduduk Sementara Rutin Minimal Per Triwulan</p> <p>3. Menyampaikan Minimal 70% Data Yang Diminta Pemerintah Kecamatan Dan Atau Kelurahan antara lain:</p> <p>a. Data Warga Miskin,</p> <p>b. Data PMKS</p> <p>c. Data Linmas</p> <p>d. Data Kejadian</p> <p>C. Kriteria RW Juara, terdapat minimal/ melaksanakan/ terdapat 5 dari 21 jenis kondisi dibawah ini :</p> <p>1. Forum Jaga Lembur;</p> <p>2. Satu Kampung Satu Taman Bermain;</p> <p>3. Balai Rw/ Markas Karang Taruna;</p> <p>4. Alat2 Band Dan Alat2 Kesenian Sunda;</p> <p>5. Paguron Silat;</p> <p>6. Sanggar Seni Sunda (Jaipongan/Kecapi Suling,Dll)</p> <p>7. Mading Manual/ Touch Screen Gabung Dengan Bangku Ala Asia Society;</p> <p>8. Biopori/ Sumur Resapan Tiap Rumah Dan Jalan/Gang;</p> <p>9. Gapura Kujang;</p> <p>10. Les Bahasa Inggris;</p> <p>11. Satu Kampung Satu Produk;</p> <p>12. Kampung Berkebun;</p> <p>13. Lampu Caang Baranang;</p> <p>14. Septic Tank Komunal;</p> <p>15. MCK Komunal;</p> <p>16. Reservoar Komunal;</p> <p>17. Gerakan Satu Rumah Satu Pohon;</p>

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN / KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
							18. Gerakan Pagar Hijau; 19. Movie On The Move (Layar Tancep)/ Nonton Bareng. 20. Media Kampanye Kampung Juara; 21. Satu Rumah Satu Tempat Sampah
		Prosentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	untuk memaksimalkan fungsi dan kegiatan lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan	Perbandingan antara jumlah lembaga kemasyarakatan yang memenuhi kriteria aktif dengan jumlah lembaga kemasyarakatan se-Kecamatan Sukasari X 100%	Kecamatan	Lembaga kemasyarakatan yang dimaksud yaitu: 1. TP PKK Kecamatan dan Kelurahan 2. LPM Kecamatan dan Kelurahan 3. Karang Taruna Kecamatan dan Kelurahan  Kriteria lembaga masyarakat aktif adalah sebagai berikut: 1. Seluruh Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan/ Kelurahan Mempunyai Rencana/ Agenda/ Program Kerja Tahunan Yang Menunjang Pembangunan Dan Pemberdayaan Sesuai Ruang Lingkup (Kecamatan/ Kelurahan); 2. Minimal 60% Ketua Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Dan Kelurahan Hadir Dalam Pembahasan Musrenbang Kecamatan; 3. Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan/ Kelurahan Melaksanakan Minimal 60% Dari Seluruh Agenda/ Program Kerja Yang Direncanakan Pada Tahun Berjalan 4. Ketua Lembaga Kemasyarakatan Aktif Mengikuti Kegiatan /Lomba /Kejuaraan Di Tingkat Kota Minimal 2 Kegiatan


 Untuk Salinan Resmi  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,**  
  
**Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si**  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 19620429 198509 1 001

**WALIKOTA BANDUNG**  
  
**TTD.**  
  
**MOCHAMAD RIDWAN**